



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122

Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

2018



Nomor : 051.2/ /2/ / 01.06 /2018
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 2 (dua) Dokumen
Perihal : Penyampaian Dokumen
LKjIP 2017 dan PK 2018

Kota Mungkid, 23 Maret 2018

Kepada :
Yth. 1. Menteri PAN dan RB RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Kepala BAPPENAS

di
JAKARTA

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magelang Tahun 2017.
2. Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih



Tembusan :

1. Biro Orpeg Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
3. Perwakilan BPKP Provinsi DIY .

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan media pertanggungjawaban capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Magelang dan dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan sumbangsuhnya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 27 Maret 2018





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno Hatta No 59 ☎ (0293) 788215
Fax (0293) 788122 Kota Mungkid 56511 Website: www.inspektorat.magelang.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
atas LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP) TAHUN 2017 KABUPATEN MAGELANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Magelang untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kelemahan yang perlu perbaikan namun kelemahan tersebut telah dilakukan perbaikan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) telah diyakini keandalannya.

Kota Mungkid, 23 Maret 2018

INSPEKTUR KABUPATEN MAGELANG



ISMU KUSWANDARI.S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19582308 198303 2 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2017. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sasaran. Penyusunan Dokumen LKjIP mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran kinerja tahun 2017 dilakukan pada indikator makro dengan 6 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja dan indikator mikro berjumlah 31 sasaran strategis dengan 166 indikator kinerja.

Capaian kinerja sasaran pada indikator makro kepala daerah tahun 2017 rata-rata kinerja sasaran telah tercapai 110,86% (Sangat Tinggi), jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh dimana capaian kinerja sasaran telah tercapai 106,63% (Sangat Tinggi), hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator makro sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui, baik pada target tahun 2017 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2019. Akan tetapi target capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak mencapai target.

Capaian kinerja sasaran pada indikator mikro Kepala Daerah tahun 2017 tercapai 102,13% (Sangat Tinggi), jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh dengan capaian kinerja sasaran telah tercapai 96,11% (Sangat Tinggi), hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator mikro sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui pada target tahun 2017 dan target akhir periode RPJMD pada tahun 2019 hampir tercapai.

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2017 mencapai rata-rata 80,61% dengan kriteria Tinggi. Tingkat capaian terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi (91% \leq 100%) dengan jumlah program 99 (59,28%) indikator dan yang paling sedikit pada katagori capaian sedang (66 % \leq 75%) sebanyak 4 (2,40%) indikator, secara detail rekapitulasi realisasi anggaran. Pada tahun anggaran 2017 terdapat 2 program yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD Kabupaten Magelang, yaitu Program Pendidikan Menengah dan Program Pendidikan Tinggi.

Tingkat efesiensi kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 19,39%, tetapi tingkat efesiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

DARTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Aspek Strategi Organisasi	3
1. Visi dan Misi	3
2. Kondisi Geografi dan Demografi	6
3. Pembagian Wilayah	8
4. Organisasi Perangkat Daerah	9
E. Isu Strategis Organisasi	14
F. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Ikhtisan Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja Organisasi	58
1. Rumus Pengukuran	58
2. Capaian Sasaran Kinerja	59
3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	47
B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017	83
C. Prestasi	195
BAB IV PENUTUP	197
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 (jiwa)	7
Tabel 1.2	Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut se-Kabupaten Magelang .	8
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2017 pada Indikator Makro.	17
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2017 pada Indikator Mikro.	19
Tabel 2.3.	Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.	27
Tabel 2.4	Dukungan Program dan Pendanaan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	35
Tabel 3.1.	Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode warna	59
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Pada Indikator Makro.	60
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Pada Indikator Mikro.	63
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.	75
Tabel 3.5	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2017.	83
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	84
Tabel 3.7	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017.	87
Tabel 3.8	Jumlah Desa yang Tergolong dalam Tingkat Kemiskinan Tinggi dan Tingkat Kesejahteraan Sangat Rendah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	90

Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	92
Tabel 3.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2017 (%)	94
Tabel 3.11	Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Nasional. Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2017.	95
Tabel 3.12	Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2017 (%).	96
Tabel 3.13	Rasio penduduk yang bekerja Tahun 2014-2017	97
Tabel 3.14	Rasio penduduk yang bekerja Menurut Umur Tahun 2016-2017.	98
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	100
Tabel 3.16	Kinerja Makro Sasaran Strategis Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017.	101
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	102
Tabel 3.18	Indikator Yang Mempengaruhi Luas Wilayah Industri Kabupaten Magelang Tahun 2014–2017.	104
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	106
Tabel 3.20	Penghitungan Opini BPK ‘WTP’ Kabupaten Magelang Tahun 2017.	107
Tabel 3.21	Penghitungan Nilai AKIP Kabupaten Magelang Tahun 2017.	109
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	110
Tabel 3.23	Angka Kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017.	111
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017.	111

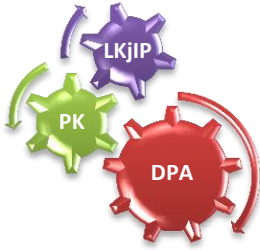
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Dan Terkontrol Kabupaten Magelang Tahun 2017.	114
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkatkan, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2017.	116
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga Kabupaten Magelang Tahun 2017.	119
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca Kabupaten Magelang Tahun 2017.	120
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2017	122
Tabel 3.30	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2017.	125
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Kabupaten Magelang Tahun 2017.	126
Tabel 3.32	Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2017.	128
Tabel 3.33	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2017.	130
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perkonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal Kabupaten Magelang Tahun 2017.	132
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	134

Tabel 3.36	Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat Magelang Tahun 2017.	136
Tabel 3.37	Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2017	137
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2017.	140
Tabel 3.39	Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2017	142
Tabel 3.40	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	143
Tabel 3.41	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	145
Tabel 3.42	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru Kabupaten Magelang Tahun 2017.	146
Tabel 3.43	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2017.	148
Tabel 3.44	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan Kabupaten Magelang Tahun 2017.	150

Tabel 3.45	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2017.	151
Tabel 3.46	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam Kabupaten Magelang Tahun 2017.	152
Tabel 3.47	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2017.	154
Tabel 3.48	Capaian Kinerja Sasaran Srategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017.	158
Tabel 3.49	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.	158
Tabel 3.50	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang Tahun 2017.	161
Tabel 3.51	Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak Kabupaten Magelang Tahun 2017.	163
Tabel 3.52	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2017.	165
Tabel 3.53	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2017.	167
Tabel 3.54	Analisa Efesiensi Penggunaan Sumberdaya.	171

DAFTAR GAMBAR

Gambar : 1.1	Peta Kabupaten Magelang.	6
Gambar : 3.1	Peta Desa Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Tahun 2017.	89
Gambar : 3.2	PDAM Tirta Gemilang mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Terbaik Dalam Kinerja dan Pelayanan Memuaskan Tahun 2017.	103
Gambar : 3.3	Anugerah Insan Pendidikan Terpuji.	117
Gambar : 3.4	Penyerahan Penghargaan Manggala Karya Kencana Kepada Bupati Magelang.	122
Gambar : 3.5	Penyerahan Penghargaan Manggala Karya Kencana Kepada Ketua Tim Pengeerak PKK.	122
Gambar : 3.6	Sertifikat ISO 9001 : 2015 untuk pelayanan AK I, AK II, AK III dan CTKI.	130
Gambar : 3.7	Bupati Magelang Menerima Piala TOP BUMD Award.	132
Gambar : 3.8	Penganugrahan BPR Award Tahun 2017 pada Katagori The Best BPR Of The Year 2017 dan The Best Ceo BPR of The Year 2017.	133
Gambar : 3.9	Penghargaan Adipura untuk Muntilan Katagori Kota Sedang.	155
Gambar : 3.10	Peyerahan dan Penyambutan Penghargaan Adipura untuk Muntilan Katagori Kota Sedang .	156
Gambar : 3.11	Penerimaan Penghargaan Proklam Tingkat Nasional kepada Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur.	156
Gambar : 3.12	Penerimaan Penghargaan Proklam Tingkat Nasional kepada Desa Sambak Kecamatan Kajoran.	157
Gambar : 3.12	Penganugerahan BPBD Kabupaten/Kota Terbaik II Wilayah Barat.	168



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan LKjIP merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai sasaran strategis suatu instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana arah pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Nawacita diamanatkan pemerintah daerah untuk tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Hal terpenting yang

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Letak Geografi
 - 3. Pembagian Wilayah
 - 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Isu Strategis Organisasi
- F. Sistematika

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016

Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);

8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja sasaran strategis dari program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis melalui pelaksanaan program.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategi Organisasi

1. Visi dan Misi

Berpedoman pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 yaitu: “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera Dan Madani“, serta mengingat pesan wasiat Bung Karno tentang doktrin TRI SAKTI Bung Karno, yaitu (1) Berdaulat di bidang politik, (2) Berdikari di bidang ekonomi, dan (3) Berkepribadian di bidang kebudayaan, serta dengan tetap memperhatikan *motto* Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” atau MAGELANG GEMILANG maka ditetapkan Visi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin Semanah”
(Sejahtera, Maju dan Amanah)**

Semanah semakna dengan “sehati”, sehingga makna semanah dimaksudkan adanya kebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintahan daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah. Oleh karena itu pernyataan visi tersebut memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun.

Sejahtera, konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera secara sederhana menurut terminologi jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir-batin, jasmani-rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas. Adapun secara akademis indikator sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah. Visi Sejahtera ini

akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama, serta membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan di dukung kondusivitas daerah. Visi Maju akan dicapai melalui misi meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Amanah, konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan insiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya, sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan

demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi merupakan rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi, sehingga secara substansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara administratif tidak menyulitkan pelaksanaannya.

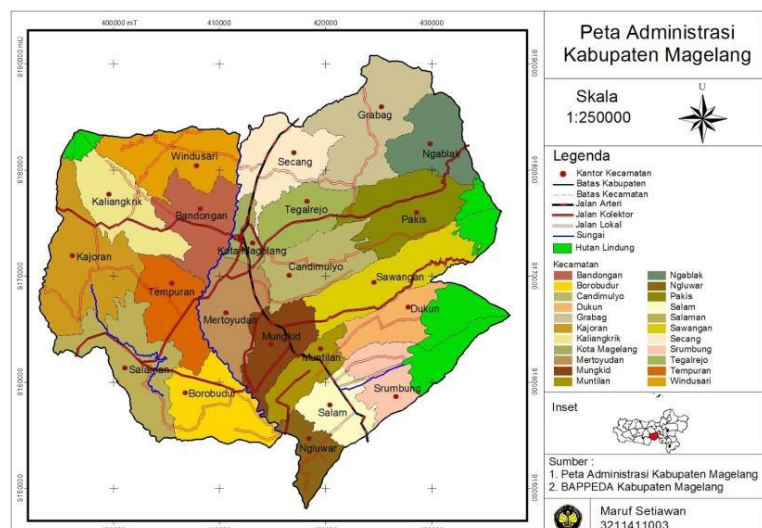
Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

2. Kondisi Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak di antara 110° 01' 51" dan 110° 26' 58" Bujur Timur dan diantara 7° 19' 13" dan 7° 42' 16" Lintang Selatan.

Berdasarkan letak ini menjadikan Kabupaten Magelang memiliki posisi yang strategis karena keberadaannya di tengah-tengah Provinsi Jawa



Gambar : 1.1. Peta Kabupaten Magelang

Tengah sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. Disamping itu Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah.



Jumlah penduduk Kabupaten Magelang tahun 2017 berdasarkan estimasi Sensus Penduduk tahun 2015 dari BPS Kabupaten Magelang sebanyak: 1. 245.496 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 624.973 jiwa dan perempuan sebanyak 620.523 jiwa. Dengan sex ratio 99,28, secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 (jiwa)

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Salaman	68.016	68.65	69.283	69.901	70.497
2.	Borobudur	57.193	57.67	58.140	58.599	59.039
3.	Ngluwar	30.590	30.79	30.995	31.187	31.371
4.	S a l a m	45.896	46.31	46.723	47.126	47.513
5.	Srumbung	46.747	47.34	47.926	48.509	49.080
6.	D u k u n	44.359	44.78	45.205	45.619	46.018
7.	Muntilan	77.306	78.04	78.763	79.475	80.161
8.	Mungkid	71.574	72.46	73.344	74.219	75.076
9.	Sawangan	55.458	56.01	56.551	57.086	57.602
10.	Candimulyo	46.963	47.44	47.919	48.386	48.840
11.	Mertoyudan	109.753	111.24	112.746	114.212	115.670
12.	Tempuran	48.003	48.47	48.938	49.394	49.834
13.	Kajoran	52.403	52.64	52.871	53.088	53.285
14.	Kaliangkrik	53.875	54.33	54.790	55.233	55.658
15.	Bandongan	56.156	56.63	57.103	57.562	58.002
16.	Windusari	48.144	48.70	49.262	49.813	50.351
17.	Secang	78.230	79.32	80.413	81.497	82.565
18.	Tegalrejo	55.332	55.98	56.636	57.279	57.907
19.	Pakis	53.330	53.62	53.913	54.188	54.443
20.	Grabag	83.878	84.56	85.237	85.895	86.526
21.	Ngablak	38.475	38.61	38.738	38.855	38.958
	Jumlah	1.221.681	1.233.69	1.245.496	1.257.123	1.268.396

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa persentase laju pertumbuhan penduduk antara Tahun 2014 sampai dengan 2015 adalah 0,96 persen dan antara tahun 2015 sampai dengan

2016 adalah 0,93 persen, serta 2016 sampai dengan 2017 adalah 0,90 persen.

3. Pembagian Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 1.085,73 Km² atau 108.573 Ha kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS Tahun 2017, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup luas 86.405 Ha lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.862 Ha dan lahan kering seluas 49.543 Ha, adapun peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 27.898 Ha dan tadah hujan (*reservation*) seluas 8.964 Ha.

Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 Km², secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 2.1.

Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut se-Kabupaten Magelang

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (Km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1.	Salaman	68,87	6,34	15	208
2.	Borobudur	54,55	5,02	4	235
3.	Ngluwar	22,44	2,07	22	202
4.	S a l a m	31,63	2,91	19	336
5.	Srumbung	53,18	4,90	19	501
6.	D u k u n	53,40	4,92	21	578
7.	Muntilan	28,61	2,64	17	348
8.	Mungkid	37,40	3,44	7	320
9.	Sawangan	72,37	6,67	15	575
10.	Candimulyo	46,95	4,32	17	437
11.	Mertoyudan	45,35	4,18	6	347
12.	Tempuran	49,04	4,52	8	210
13.	Kajoran	83,41	7,68	31	578
14.	Kaliangkrik	57,34	5,28	34	823
15.	Bandongan	45,79	4,22	20	431
16.	Windusari	61,65	5,68	25	525
17.	Secang	47,34	4,36	22	470
18.	Tegalrejo	35,89	3,31	22	478

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (Km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
19.	Pakis	69,56	6,41	29	841
20.	Grabag	77,16	7,11	33	680
21.	Ngablak	43,80	4,03	37	1.378
	Total	1.085,7	100.00		

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2018*

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan dengan dusun 2.379 dusun dan Rukun Tetangga (RT) 10.966 RT

4. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksanaan, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah, dan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat.

Perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan mempunyai intensitas tinggi dibentuk kecamatan dan kelurahan.

Dalam rangka membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

Sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah dan diamanatkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang meliputi :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah berjumlah 18 (delapan belas) terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;

8. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 15. Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Peternakan dan bidang Kelautan dan Perikanan;
 16. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 17. Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan; dan
 18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- e. Badan Daerah berjumlah 3 (tiga) terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;

3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.

f. Kecamatan berjumlah 21 (dua puluh satu) terdiri dari:

1. Kecamatan Salaman;
2. Kecamatan Borobudur;
3. Kecamatan Ngluwar;
4. Kecamatan Salam;
5. Kecamatan Srumbung;
6. Kecamatan Dukun;
7. Kecamatan Sawangan;
8. Kecamatan Muntilan;
9. Kecamatan Mungkid;
10. Kecamatan Mertoyudan;
11. Kecamatan Tempuran;
12. Kecamatan Kajoran;
13. Kecamatan Kaliangkrik;
14. Kecamatan Bandongan;
15. Kecamatan Candimulyo;
16. Kecamatan Pakis;
17. Kecamatan Ngablak;
18. Kecamatan Grabag;
19. Kecamatan Tegalrejo;
20. Kecamatan Secang; dan
21. Kecamatan Windusari.

Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan berjumlah 5 (lima) terdiri dari:

- a. Kelurahan Muntilan pada Kecamatan Muntilan;
- b. Kelurahan Mendut pada Kecamatan Mungkid;
- c. Kelurahan Sawitan pada Kecamatan Mungkid;
- d. Kelurahan Sumberrejo pada Kecamatan Mertoyudan; dan
- e. Kelurahan Secang pada Kecamatan Secang.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Magelang adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Bupati dibantu oleh perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu tugas Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dengan fungsinya:
 - 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah daerah;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - 3) Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
 - 4) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Tugas Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dengan fungsinya:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.
- c. Tugas Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidangnya dengan fungsinya:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) Penyediaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Tugas Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan dengan fungsinya:
 - 1) Perumusan kebijakan pemerintah Kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintah kecamatan;
 - 3) Pengendalian sumberdaya aparatur, prasarana dan sarana pemerintah Kecamatan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Isu Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang terdapat 6 (enam) isu strategis yang terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dan kehidupan beragama
 - a. Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pemberian pendidikan setara dan layak serta peningkatan kompetensi para pendidik;
 - b. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan serta pemenuhan prasarana pelayanan kesehatan;
 - c. Perlunya pemberdayaan rakyat miskin untuk meningkatkan kemandirian masyarakat;
 - d. Perlunya penguatan modal sosial dan budaya lokal;
 - e. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan;
 - f. Perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
2. Perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing
 - a. Perlunya peningkatan pendapatan masyarakat berbasis Usaha Menengah Kecil Mikro;
 - b. Perlunya peningkatan kemandirian perekonomian daerah yang mampu berdaya saing;
 - c. Perlunya peningkatan pengembangan pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), pariwisata dan industri kecil/menengah sebagai sektor unggulan daerah;
 - d. Perlunya revitalisasi pasar tradisional, membangun pusat perdagangan bersama bagi hasil pertanian, peternakan dan produk UMKM, dan membangun jejaring kemitraan dengan pihak lain;
 - e. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh.
3. Pembangunan prasarana dan sarana daerah
 - a. Perlunya pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat;
 - b. Perlunya peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan bantuan stimulan guna peningkatan angka rumah layak huni;
 - c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan guna peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
 - d. Perlunya upaya pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell*, dan panas bumi guna memenuhi layanan pasokan listrik.

4. permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup
 - a. Perlunya pelestarian lingkungan hidup dengan adanya perencanaan pembangunan berkelanjutan;
 - b. Perlunya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Perlunya ‘pencegahan’ dan pengendalian pencemaran lingkungan.
5. Tata kelola pemerintahan
 - a. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. Perlunya percepatan reformasi birokrasi dalam upaya menuju *Good Governance*;
 - c. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.
6. Keamanan dan ketenteraman masyarakat
 - a. Perlunya optimalisasi penegakan hukum oleh aparaturnya yang dibantu masyarakat;
 - b. Perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.

F. Sistematika

Sistematika penulisan dokumen LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2017.

C. Prestasi

Sub Bab ini berisi prestasi yang diarah oleh Kabupaten Magelang.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan keinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi, Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan dokumentasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2017 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini pada hakikatnya merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2017.

Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2017 telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 pada Indikator Makro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
Indikator Makro Kepala Daerah					
A	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama				
1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkatkan	1	Angka Usia Harapan Hidup	70,45	tahun
		2	Indeks Gini	0,305	indeks
		3	IndeksWilliamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4066	indeks
		4	Persentase penduduk miskin	9,99	persen
		5	IPM	75,14	indeks
B	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya saing				
2	Terwujudnya Peningkatan	6	Pertumbuhan PDRB	6,0 – 6,5	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah	7	PDRB per kapita	12,56	Juta Rp
		8	Laju inflansi	5±1	persen
		9	Rasio penduduk yang bekerja	97,17	persen
		10	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	32,47	Rp,(juta)
		11	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	36,09	persen
		12	Nilai tukar petani	106,70	
C	MISI III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah	13	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,0021	
D	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup				
4	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan	14	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	76,40	persen
		15	Luas Wilayah Industri	0,37	persen
E	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis				
5	Meningkatkan Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis	16	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	hari
		17	Opini BPK 'WTP'	WTP	
		18	Nilai AKIP	B	
F	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat				
6	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	19	Angka kriminalitas	2,13	indek

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2018

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2017 pada Indikator Makro terdapat 6 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja. Selain Indikator makro terdapat indikator mikro yang diukur sebagai kinerja Kepala Daerah. Jumlah sasaran strategis pada indikator mikro berjumlah 31 sasaran strategis dengan 166 indikator kinerja sasaran strategis, secara terinci sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 pada Indikator Mikro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
Indikator Mikro					
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama				
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan ^{*)}	11	kasus
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran ^{*)}	6.6	kasus
		3	Persentase Balita Gizi Buruk ^{*)}	0.15	persen
		4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup ^{*)}	8	Permil
		5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	persen
		6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	persen
		7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	persen
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90	persen
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	persen
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	95	persen
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,63	persen
		12	Rasio Akseptor KB	81,40	persen
		13	Cakupan Peserta KB Aktif	80,79	persen
		14	Keluarga Pra Sejahtera	22,38	persen
		15	Keluarga Sejahtera I	15,38	persen
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkatkan, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	16	APK PAUD	54.23	persen
		17	Angka melek huruf	93.75	persen
		18	Angka rata-rata lama sekolah	9	persen
			Angka Partisipasi Murni :		
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96.09	persen
20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80.85	persen		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan		
1	2	3		4	5		
		21	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	51.56	persen		
			<i>Angka partisipasi kasar</i>				
		22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	101.04	persen		
		23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	95.56	persen		
		24	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	73.4	persen		
			<i>Angka Putus Sekolah:</i>				
		25	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.15	persen		
		26	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.61	persen		
		27	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0.82	persen		
			<i>Angka Kelulusan:</i>				
		28	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.91	persen		
		29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.96	persen		
		30	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99.1	persen		
			<i>Rerata Nilai UN :</i>				
		31	Rerata Nilai UN SD/MI	7.7	nilai		
		32	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6.46	nilai		
		33	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	7.14	nilai		
		34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85	persen		
			<i>Angka Melanjutkan :</i>				
		35	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89.42	persen		
		36	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	69.87	persen		
		37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	82.81	persen		
		38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	88.57	persen		
		4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	39	Jumlah Organisasi Pemuda	26	organisasi
				40	Jumlah Organisasi Olah Raga	33	organisasi
				41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	18	kegiatan
				42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	24	kegiatan
				43	Lapangan Olah Raga	1,00	permil
		5	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	44	Jumlah Perpustakaan	773	unit
				45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	43576	orang
				46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	2,15	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,52	persen
		48	Rasio KDRT	0,026	persen
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100	persen
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	unit
		51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	17,40	persen
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	kali
		53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	18	unit
		54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	66.85	persen
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	17,00	persen
		56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	28,23	persen
		57	Jumlah LSM	5	LSM
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing				
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	75,46	persen
		59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	persen
		60	Pencari Kerja yang Ditempatkan	38,42	persen
		61	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,16	persen
		62	Keselamatan dan Perlindungan	75,00	persen
		63	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	persen
2	Membbaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	64	Persentase Koperasi Aktif	77,76	persen
		65	Jumlah UKM non BPR/LKM	106.391	UKM non BPR/LKM
		66	Jumlah BPR/LKM	375	BPR/LKM
		67	Usaha Mikro dan Kecil	0,36	persen
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.005	investor
		69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	605.681	Juta rupiah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	25,19	persen
		71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	254	milyar rupiah
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188,04	persen
		73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	91,5	
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar		
		74	Produktivitas Padi	60.08	Kw/ha
		75	Produksi Padi	335,534	Ton/th
		76	Produktivitas Jagung	59	Kw/ha
		77	Produksi Jagung	74,277	Ton/th
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	21.75	persen
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	72.61	persen
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	7.46	persen
		81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	12.64	persen
		82	Cakupan Bina Kelompok Petani	2.3	persen
			Produksi Hewan ternak		
		83	Sapi potong	1789859	kg
		84	Kerbau	520	kg
		85	Kambing	762462	kg
		86	Domba	1072305	kg
			Produksi Hewan Unggas		
		87	Ayam Pedaging	9570.5	ton
		88	Ayam Ras Petelur	980000	ton
		89	Ayam Buras	1.9183	ton
		90	Itik	90451	ton
		91	Sapi Perah	717184	liter
		Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)			
	92	Daging	5.75	gr/kap/hr	
	93	Telur	4.1	gr/kap/hr	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		94	Susu	0.06	gr/kap/hr
6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	95	Produksi Perikanan (Benih)	1.5	juta ekor
		96	Produksi Perikanan Budidaya	16	ton
		97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	234.68	ton
		98	Konsumsi Ikan	15	Kg/kap/tahun
		99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	2.55	persen
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	10,04	persen
		101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	88,6	Juta US\$
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	1,80	persen
8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2,81	persen
		104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	18,11	persen
		105	Pertumbuhan Industri.	3,76	persen
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	106	Kunjungan Wisata Manca Negara	607.689	orang
		107	Kunjungan Wisata Nusantara	5.392.611	orang
		108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6.36	persen
C. MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah					
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,25	persen
		110	Rasio Jaringan Irigasi	30,57	persen
		111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62,70	persen
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	82,00	persen
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,55	persen
		114	Rumah Layak Huni (%)	75,00	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	115	Persentase Pertambahan Berijin	30	persen
		116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2,63	persen
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	orang
		118	Jumlah Ijin Trayek	1.041	ijin
		119	Rasio Uji Kir Kendaraan	95,9	persen
		120	Jumlah Terminal Bis	7	terminal
		121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	menit
		122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	Ada	
		123	Pemasangan Rambu-Rambu	75,00	persen
D. MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup					
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	persen
		125	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	3,70	persen
		126	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0	persen
		127	Luas Kawasan Lindung (ha)	25.886	ha
		128	Luas Kawasan Budidaya (ha)	8.2687	Ha
		129	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	613	IMB
		130	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	38,00	persen
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	131	Persentase Penanganan Sampah	27	persen
		132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	1.7	persen
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	25	persen
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	0.078	persen
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	100000	m ³

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2.538	ha
		137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4.75	persen
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis				
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	
		139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	
		140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	
		141	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	persen
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	142	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0.44	
		143	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	98.41	
		144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	4	
		145	Penegakan PERDA	75	persen
		146	Persentase Peningkatan PAD	12,02	persen
		147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada	
		148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	
		149	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	
		150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	72.87	persen
		151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	535	orang
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6/0	penyiaran
		153	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada	
		154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	3/9	
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91.79	persen
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	93.37	persen
		157	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1.7	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33,76	persen
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	100	persen
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat				
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	12	kegiatan
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	10	kegiatan
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	80	persen
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	persen
		165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	80	persen
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	persen

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2018

Catatan : *) Indikator Negatif

Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2017 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2017
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22,783,267,700	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak - Pendapatan Asli Daerah - Hibah - SILPA
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	136,681,374,893	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	593,814,000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4,001,036,375	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1,360,133,100	
6	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	7,982,912,400	
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15,164,288,321	
8	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	110,000,000	
9	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	635,000,000	
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	700,934,000	
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	347,200,000	
12	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,728,244,000	
13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	512,528,000	
14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	29,735,606,632	
15	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Praspuskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	19,375,345,463	
16	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru Dan RS Mata	44,946,546,900	
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	19,000,000	
18	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	21,961,600	
19	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	3,379,994,000	
20	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	171,649,335,782	
21	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	3,000,000	
22	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	255,433,000	
23	Program Keluarga Berencana	2,285,956,235	

No	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1	2	3	4
24	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	74,300,000	
25	Program Pelayanan Kontrasepsi	434,495,000	
26	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	48,500,000	
27	Program Pendidikan Anak Usia Dini	728,200,335	
28	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	197,466,972,597	
29	Program Pendidikan Menengah	0	
30	Program Pendidikan Tinggi	0	
31	Program Pendidikan Non Formal	1,970,845,000	
32	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4,253,586,700	
33	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	22,566,168,380	
34	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	616,000,000	
35	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	368,000,000	
36	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	310,000,000	
37	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	2,454,825,000	
38	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	15,702,425,000	
39	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	993,336,150	
40	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	206,926,000	
41	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	401,100,000	
42	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	309,800,000	
43	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30,000,000	
44	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1,012,425,000	
45	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2,139,176,000	
46	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	370,300,000	
47	Program Pembinaan Anak Terlantar	100,000,000	
48	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	253,507,000	

No	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1	2	3	4
49	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	20,000,000	
50	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)	36,890,000	
51	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	3,017,553,500	
52	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,273,028,000	
53	Program Pengembangan Nilai Budaya	2,305,927,000	
54	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	288,883,000	
55	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4,509,092,500	
56	Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1,495,612,000	
57	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,340,739,000	
58	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	996,717,300	
59	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,844,858,000	
60	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1,695,453,000	
61	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	288,759,000	
62	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	482,704,500	
63	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	403,095,000	
64	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	864,929,100	
65	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	267,676,000	
66	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	639,607,000	
67	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	298,516,300	
68	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	545,594,800	
69	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah	57,003,000	
70	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1,179,267,500	
71	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	21,046,994,098	
72	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	932,732,400	
73	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	542,299,000	

No	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1	2	3	4
74	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	1,211,597,000	
75	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	561,998,500	
76	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2,241,582,500	
77	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	762,450,000	
78	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	60,000,000	
79	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1,211,597,000	
80	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	975,611,200	
81	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	464,422,000	
82	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	253,372,500	
83	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perdagangan	52,779,794,500	
84	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	1,058,397,965	
85	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	231,858,500	
86	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	298,516,300	
87	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	4,265,150,000	
88	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	22,005,000	
89	Program Penataan Struktur Industri	3,296,122,000	
90	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1,410,893,000	
91	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7,699,158,850	
92	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,268,814,000	
93	Program Pengembangan Kemitraan	369,330,000	
94	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	132,586,251,140	
95	Program Pembangunan Drainase/Gorong Gorong	10,019,921,000	
96	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	49,224,847,679	
97	Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan	86,798,000	

No	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1	2	3	4
98	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	1,119,787,550	
99	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasirawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	35,024,614,549	
100	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	9,014,684,720	
101	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	192,100,000	
102	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	403,900,000	
103	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	929,911,000	
104	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi Dan Sumber Daya Air	143,375,000	
105	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	7,785,912,920	
106	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37,501,825,000	
107	Program Pengembangan Perumahan	1,466,872,975	
108	Program Lingkungan Sehat Perumahan	601,040,500	
109	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	813,301,000	
110	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	356,300,000	
111	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	913,921,850	
112	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	286,000,000	
113	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	701,050,000	
114	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	203,167,000	
115	Program Perencanaan Tata Ruang	742,740,000	
116	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	433,577,000	
117	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	22,182,457,000	
118	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	3,508,715,587	
119	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	265,000,000	
120	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	6,667,991,000	
121	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,803,304,500	
122	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	229,821,101	

No	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1	2	3	4
123	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	359,726,000	
124	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Tawar	43,500,000	
125	Program Pengembangan Kapasitas Dan Kemampuan Laboratorium Lingkungan	110,000,000	
126	Program Pengembangan Data /Informasi	826,305,810	
127	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,581,589,425	
128	Program Kerjasama Pembangunan	175,000,000	
129	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	336,756,000	
130	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	314,448,000	
131	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	968,622,000	
132	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumberdaya Alam	53,758,750	
133	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	70,000,000	
134	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20,403,253,430	
135	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3,190,942,200	
136	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	2,211,284,000	
137	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	4,001,036,375	
138	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1,411,445,000	
139	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	607,966,000	
140	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1,094,323,000	
141	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2,585,505,750	
142	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	79,790,000	
143	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,005,749,380	
144	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	22,422,000	
145	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	21,854,971,500	
146	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	120,725,151	

No	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1	2	3	4
147	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1,425,000	
148	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	1,335,595,500	
149	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	160,400,000	
150	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	216,000,000	
151	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	53,426,000	
152	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	231,877,700	
153	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	3,906,891,500	
154	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	657,585,000	
155	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	2,708,948,775	
156	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6,780,386,380	
157	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	248,440,000	
158	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	30,000,000	
159	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	569,266,000	
160	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	3,552,383,000	
161	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	898,292,000	
162	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	276,535,000	
163	Program Pendidikan Politik Masyarakat	135,000,000	
164	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1,343,878,380	
165	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	380,134,000	
166	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	37,360,000	
167	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	173,632,000	
Jumlah :		1,254,128,725,778	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2018

Total anggaran APBD Kabupaten Magelang setelah perubahan anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 1,254,128,725,778 (*Satu trilyun dua ratus lima puluh empat milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*), anggaran tersebut terdiri dari 167 program untuk mendukung pencapaian kinerja pada 31 sasaran strategis dengan 166 Indikator Kinerja. Sumber pendanaan terdiri dari : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Hibah dan SILPA.

Untuk mengetahui dukungan program dan pendanaan dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja, maka dilakukan pemetaan program dan sasaran strategis terhadap capaian indikator strategis pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Dukungan Program dan Pendanaan Sasaran Strategis
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama							
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	11	kasus	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	3,379,994,000	0.27
						Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	171,649,335,782	13.69
						Program Pengawasan Obat dan Makanan	110,000,000	0.01
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan RS mata	44,946,546,900	3.58
						Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	19,000,000	0.0015
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran *)	6.6	kasus	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	3,000,000	0.0002
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	512,528,000	0.04
		3	Persentase Balita Gizi Buruk *)	0.15	persen	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	700,934,000	0.06
						Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	21,961,600	0.002

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
		4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup *)	8	Permil	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	635,000,000	0.05
		5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	persen	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	347,200,000	0.03
		6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	persen	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7,982,912,400	0.64
		7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	persen	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15,164,288,321	1.21
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90	persen	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,728,244,000	0.14
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	persen	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	29,735,606,632	2.37
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	95	persen	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan praspuskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	19,375,345,463	1.54
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan	11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,63	persen	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	255,433,000	0.02
		12	Rasio Akseptor KB	81,40	persen	Program Keluarga Berencana	2,285,956,235	0.18

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
	Terkontrol	13	Cakupan Peserta KB Aktif	80,79	persen	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	74,300,000	0.01
		14	Keluarga Pra Sejahtera	22,38	persen	Program pelayanan Kontrasepsi	434,495,000	0.03
		15	Keluarga Sejahtera I	15,38	persen	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	48,500,000	0.004
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkatkan, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	16	APK PAUD	54.23	persen	Program Pendidikan Anak Usia Dini	728,200,335	0.06
		17	Angka melek huruf	93.75	persen	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	22,566,168,380	1.80
		18	Angka rata-rata lama sekolah	9	Tahun	Program Pendidikan Non Formal	1,970,845,000	0.16
			Angka Partisipasi Murni :					
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96.09	persen	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	197,466,972,597	0.01
		20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80.85	persen			
		21	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	51.56	persen			
			Angka partisipasi kasar					
		22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	101.04	persen			
	23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	95.56	persen				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
		24	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	73.4	persen			
			Angka Putus Sekolah:					
		25	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.15	persen			
		26	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.61	persen			
		27	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0.82	persen			
			<i>Angka Kelulusan:</i>					
		28	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.91	persen	Program Pendidikan Menengah	0	0.00
		29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.96	persen			
		30	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99.1	persen			
			<i>Rerata Nilai UN :</i>					
		31	Rerata Nilai UN SD/MI	7.7	nilai			
		32	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6.46	nilai			
		33	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	7.14	nilai			
		34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85	persen	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,253,586,700	0.34
			<i>Angka Melanjutkan :</i>					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
		35	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89.42	persen			
		36	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	69.87	persen			
		37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	82.81	persen			
		38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	88.57	persen			
4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	39	Jumlah Organisasi Pemuda	26	organisasi	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	616,000,000	0.05
						Program peningkatan peran serta kepemudaan	368,000,000	0.03
		40	Jumlah Organisasi Olah Raga	33	organisasi	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	2,454,825,000	0.20
		41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	18	kegiatan	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	310,000,000	0.02
		42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	24	kegiatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	15,702,425,000	1.25
		43	Lapangan Olah Raga	1,00	permil			
5	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	44	Jumlah Perpustakaan	773	unit	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	993,336,150	0.08
		45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	43576	orang			
		46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	2,15	persen			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,52	persen	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	206,926,000	0.02
		48	Rasio KDRT	0,026	persen	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	401,100,000	0.03
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100	persen	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	309,800,000	0.02
						Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30,000,000	0.002
						Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1,012,425,000	0.08
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	unit	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2,139,176,000	0.17
		51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	17,40	persen	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	370,300,000	0.03
						Program pembinaan anak terlantar	100,000,000	0.01
						Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	253,507,000	0.02
						Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	20,000,000	0.002

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
						Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	36,890,000	0.003
						Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	3,017,553,500	0.24
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	kali	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,273,028,000	0.10
		53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	18	unit	Program Pengembangan Nilai Budaya	2,305,927,000	0.18
		54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	66.85	persen	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	288,883,000	0.02
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	17,00	persen	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4,509,092,500	0.36
		56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	28,23	persen	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1,495,612,000	0.12
		57	Jumlah LSM	5	LSM	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,340,739,000	0.11
						Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	996,717,300	0.08

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing							
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	75,46	persen	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,844,858,000	0.23
		59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	persen	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1,695,453,000	0.14
		60	Pencari Kerja yang Ditempatkan	38,42	persen	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	288,759,000	0.02
		61	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,16	persen			
		62	Keselamatan dan Perlindungan	75,00	persen			
		63	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	persen			
2	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	64	Persentase Koperasi Aktif	77,76	persen	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	482,704,500	0.04
		65	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.391	UKM non BPR/ LKM UKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	403,095,000	0.03
		66	Jumlah BPR/LKM	375	BPR/LKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	864,929,100	0.07

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
		67	Usaha Mikro dan Kecil	0,36	persen	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	267,676,000	0.02
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.005	investor	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	639,607,000	0.05
		69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	605.681	Juta rupiah	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	298,516,300	0.02
		70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	25,19	persen	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	545,594,800	0.04
		71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	254	milyar rupiah	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	57,003,000	0.00
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188,04	persen	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1,179,267,500	0.09
		73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	91,5				
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar						
		74	Produktivitas Padi	60.08	Kw/ha	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	21,046,994,098	1.68
		75	Produksi Padi	335,534	Ton/th	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	932,732,400	0.07

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
		76	Produktivitas Jagung	59	Kw/ha	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	542,299,000	0.04
		77	Produksi Jagung	74,277	Ton/th	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	1,211,597,000	0.10
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	21.75	persen	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	975,611,200	0.08
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	72.61	persen			
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	7.46	persen			
		81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	12.64	persen			
		82	Cakupan Bina Kelompok Petani	2.3	persen			
			Produksi Hewan ternak					
		83	Sapi potong	1789859	kg			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
		84	Kerbau	520	kg	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2,241,582,500	0.18
		85	Kambing	762462	kg			
		86	Domba	1072305	kg			
			Produksi Hewan Unggas					
		87	Ayam Pedaging	9570.5	ton	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	762,450,000	0.06
		88	Ayam Ras Petelur	980000	ton	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	60,000,000	0.005
		89	Ayam Buras	1.9183	ton			
		90	Itik	90451	ton			
		91	Sapi Perah	717184	liter			
			Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)					
		92	Daging	5.75	gr/kap/hr			
		93	Telur	4.1	gr/kap/hr			
		94	Susu	0.06	gr/kap/hr			
		6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	95	Produksi Perikanan (Benih)	1.5	juta ekor	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
96	Produksi Perikanan Budidaya			16	ton			
97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)			234.68	ton			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
		98	Konsumsi Ikan	15	Kg/kap/ tahun			
		99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	2.55	persen			
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	10,04	persen	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	52,779,794,500	4.21
		101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	88,6	Juta US\$	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1,058,397,965	0.08
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	1,80	persen	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	231,858,500	0.02
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	4,265,150,000					0.34		
8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2,81	persen	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	22,005,000	0.002
		104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	18,11	persen			
		105	Pertumbuhan Industri.	3,76	persen	Program Penataan Struktur Industri	3,296,122,000	0.26
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1,410,893,000					0.11		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	106	Kunjungan Wisata Manca Negara	607.689	orang	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7,699,158,850	0.61
		107	Kunjungan Wisata Nusantara	5.392.611	orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,268,814,000	0.10
		108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6.36	persen	Program Pengembangan Kemitraan	369,330,000	0.03
C.	MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah							
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,25	persen	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	132,586,251,140	10.57
						Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	49,224,847,679	3.93
						Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	86,798,000	0.01
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1,119,787,550	0.09
						Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	192,100,000	0.02
						Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	403,900,000	0.03
		110	Rasio Jaringan Irigasi	30,57	persen	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	10,019,921,000	0.80
111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62,70	persen	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	35,024,614,549	2.79		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	9,014,684,720	0.72
						Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	929,911,000	0.07
						Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	143,375,000	0.01
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	82,00	persen	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37,501,825,000	2.99
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,55	persen	Program Pengembangan Perumahan	1,466,872,975	0.12
		114	Rumah Layak Huni (%)	75,00	persen	Program Lingkungan Sehat Perumahan	601,040,500	0.05
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	115	Persentase Pertambangan Berijin	30	persen			
		116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2,63	persen			
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	orang	Program peningkatan pelayanan angkutan	913,921,850	0.07
		118	Jumlah Ijin Trayek	1.041	ijin	Program Pembangunan Prasarana	813,301,000	0.06

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
		119	Rasio Uji Kir Kendaraan	95,9	persen	dan Fasilitas Perhubungan		
		120	Jumlah Terminal Bis	7	terminal	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	286,000,000	0.02
		121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	menit	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	701,050,000	0.06
		122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	Ada		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	203,167,000	0.02
		123	Pemasangan Rambu-Rambu	75,00	persen	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	356,300,000	0.03
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup							
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang	124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	persen	Program Perencanaan Tata Ruang	742,740,000	0.06

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
	Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	125	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	3,70	persen	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	433,577,000	0.03
		126	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0	persen			
		127	Luas Kawasan Lindung (ha)	25.886	ha			
		128	Luas Kawasan Budidaya (ha)	8.2687	Ha			
		129	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	613	IMB			
		130	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	38,00	persen			
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang	131	Persentase Penanganan Sampah	27	persen	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	22,182,457,000	1.77
		132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan	1.7	persen	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3,508,715,587	0.28

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
	Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya		Longsor dan Sumber Mata Air			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	265,000,000	0.02
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	25	persen	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,803,304,500	0.22
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	0.078	persen	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	6,667,991,000	0.53
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	100000	m ³	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	229,821,101	0.02
						Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	359,726,000	0.03
						Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	43,500,000	0.003
						Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	110,000,000	0.01
		3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2.538	ha	
137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)			4.75	persen			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran	
1	2	3		4	5	6	7		
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis								
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada		Program Pengembangan Data /Informasi	826,305,810	0.07	
		139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,581,589,425	0.13	
		140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada		Program Kerjasama Pembangunan	175,000,000	0.01	
		141	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100		persen	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	336,756,000	0.03
							Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	314,448,000	0.03
							Program Perencanaan Sosial dan Budaya	968,622,000	0.08
							Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	53,758,750	0.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	70,000,000	0.01
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	142	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0.44		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3,190,942,200	0.25
						Peningkatan Manajemen Kepegawaian	1,335,595,500	0.11
		143	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	98.41		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1,425,000	0.00
						Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2,211,284,000	0.18
		144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	4		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	22,422,000	0.002
						Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	21,854,971,500	1.74
						Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	79,790,000	0.01
						Program peningkatan disiplin aparatur	593,814,000	0.05
145	Penegakan PERDA	75	persen	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4,001,036,375	0.32		
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1,411,445,000	0.11		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
						Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,005,749,380	0.16
		146	Persentase Peningkatan PAD	12,02	persen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20,403,253,430	1.63
						Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	607,966,000	0.05
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22,783,267,700	1.82
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136,681,374,893	10.90
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,360,133,100	0.11
		147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1,094,323,000	0.09
						Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	120,725,151	0.01
		148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2,585,505,750	0.21
		149	Buku "PDRB Kabupaten"	ada				
		150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	72.87	persen	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	216,000,000	0.02

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
		151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	535	orang	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	53,426,000	0.004
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	231,877,700	0.02
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6/0	penyiaran	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	3,906,891,500	0.31
		153	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	657,585,000	0.05
		154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	3/9		Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	2,708,948,775	0.22
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91.79	persen	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6,780,386,380	0.54
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	93.37	persen			
		157	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1.7	persen			
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah				
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33,76	persen	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	248,440,000	0.02
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	100	persen	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30,000,000	0.002

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat							
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	12	kegiatan	Program pengembangan wawasan kebangsaan	569,266,000	0.05
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	10	kegiatan	Program pendidikan politik masyarakat	135,000,000	0.01
						Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	898,292,000	0.07
						Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	276,535,000	0.02
						Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,343,878,380	0.11
						Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	380,134,000	0.03
						Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	37,360,000	0.003
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	80	persen	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	3,552,383,000	0.28

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	persen	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	7,785,912,920	0.62
		165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	80	persen			
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	persen			
Jumlah :							1,254,128,725,778	100.00

Sumber : BPPKAD dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2018, data diolah



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kepala

Daerah Kabupaten Magelang merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2017. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

AKUNTABILITAS
KINERJA
A. Pengukuran Kinerja Organisasi.
B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja
C. Prestasi

A. Pengukuran Kinerja Organisasi

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

➤ Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:






$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (*) pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode warna

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Pemendagri 86 tahun 2017, diolah

2. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2017 dilakukan analisis dengan dilakukan perbandingan antar capaian kinerja dan target kinerja tahun 2017 dan target kinerja hingga akhir periode RPJMD pada tahun 2019, hasil analisa sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Pada Indikator Makro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	Capaian 2017			Akhir RPJMD (2019)	
					Target	Kinerja	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkatkan	1 Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,27	70,45	73,27	104,00	70,56	104,84
		2 Indeks Gini *)	Indeks	0,34	0,305	0,31	98,36	0,295	94,92
		3 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,4073	0,4066	0,41	100,84	0,4046	98,67
		4 Persentase penduduk miskin *)	Persen	13,07	9,99	12,42	75,68	8,00	44,75
		5 IPM	Indeks	67,92	75,14	74,74	99,47	75,94	98,42
2	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah	6 Pertumbuhan PDRB	Persen	5,49	6,0-6,5	5,43	90,50	6,4 - 7,1	84,84
		7 PDRB per kapita	Juta Rp	20,69	12,56	22,35	177,95	15,06	148,41
		8 Laju inflansi	Persen	2,86	5±1	3,47	69,40	4±1	86,75
		9 Rasio penduduk yang bekerja	persen	96,77	97,17	96,79	99,61	97,97	98,80
		10 Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Rp,(juta)	60,03	32,47	51,74	159,35	38,38	134,81
		11 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	persen	59,85	36,09	55,80	154,61	37,03	150,69
		12 Nilai tukar petani		106,56	106,7	106,70	100,00	106,99	99,73
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah	13 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0,0029	0,0021	0,0029	138,10	0,0017	170,59
4	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan	14 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	persen	80,13	76,4	83,09	108,76	95,66	86,86
		15 Luas Wilayah Industri	persen	1,6	0,37	0,34	91,89	0,37	91,89
5	Meningkatkan Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis	16 Lama Proses Perijinan (Hari)	hari	9	9	9	100,00	9	100,00
		17 Opini BPK 'WTP'		WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
		18 Nilai AKIP		CC	B	CC	50,00	B	50,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2016	Capaian 2017			Akhir RPJMD (2019)	
						Target	Kinerja	%	Target	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
6	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	19	Angka kriminalitas *)	indek	0,22	2,13	0,26	187,79	1,45	182,07
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran :								110.86		106.63

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018, data diolah.

Keterangan : *) Indikator negatif

Berdasarkan tabel di atas dalam capaian kinerja sasaran pada indikator makro kepala daerah tahun 2017 rata-rata kinerja sasaran telah tercapai 110,86% dengan kriteria sangat tinggi, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh dimana capaian kinerja sasaran telah tercapai 106,63% dengan kriteria sangat tinggi, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator makro sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui, baik pada target tahun 2017 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2019. Akan tetapi target capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu: Presentase penduduk miskin, laju inflasi dan Nilai AKIP memiliki kinerja capaian sangat rendah dengan kinerja $\leq 50\%$.

Pada Capaian kinerja tahun 2017 jika dibandingkan dengan target yang akhir masa RPJMD pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu : Nilai AKIP memiliki kinerja sangat rendah dan persentase Penduduk Miskin memiliki kinerja sangat rendah dengan kinerja $\leq 50\%$.

Secara umum capaian kinerja sasaran Kepala Daerah Kabupaten Magelang pada 6 Sasaran dan 19 indikator Kinerja telah mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 maupun pada target kinerja akhir periode RPJMD pada tahun 2019, kriteria capaian kinerja dengan katagori sangat tinggi dengan skor $91\% \leq 100\%$.

Capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun Anggaran 2017 pada indikator mikro dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Pada Indikator Mikro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD	
					Target	Realisasi	% Capain			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. MISI I: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama										
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	kasus	13	11	8	127.27	11	127.27
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran *)	kasus	8,17	6,60	6,63	99.55	6,50	98.00
		3	Persentase Balita Gizi Buruk *)	persen	13	0,15	0,02	186.67	0,15	186.67
		4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup *)	Permil	8,17	8,00	7,5	106.25	8,00	106.25
		5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	persen	13	100	100	100.00	100	100.00
		6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	persen	8,17	100	100	100.00	100	100.00
		7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	persen	13	100	100	100.00	100	100.00
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	persen	8,17	90	90	100.00	90,00	100.00
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	persen	13	100	100	100.00	100	100.00
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	persen	8,17	95	95,56	100.59	95,00	100.59
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	persen	1,27	1.63	1,13	69.33	1,57	71.97
		12	Rasio Akseptor KB	persen	79,77	81.4	79,71	97.92	81,50	97.80

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capain		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		13	Cakupan Peserta KB Aktif	persen	79,77	80.79	79,71	98.66	80,89	98.54
		14	Keluarga Pra Sejahtera	persen	23,32	22.38	22,33	99.78	20,18	110.65
		15	Keluarga Sejahtera I	persen	16,98	15.38	16,39	106.57	14,38	113.98
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkatkan, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	16	APK PAUD	persen	60,27	54,23	62,64	115.51	54,54	54,54
		17	Angka melek huruf	persen	93,55	93,75	94,63	100.94	93,95	100.72
		18	Angka rata-rata lama sekolah	persen	7,19	9,00	7,40	82.22	10	95.44
			Angka Partisipasi Murni :							
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	persen	89,70	96,09	92,66	96.43	97,09	95.44
		20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	persen	62,78	80,85	67,76	83.81	82,65	81.98
		21	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	persen	42,70	51,56	46,88	90.92	66,56	70.43
			Angka partisipasi kasar							
		22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	persen	103,69	101,04	105,77	104.68	101,84	103.86
		23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	persen	82,40	96,56	88,36	91.51	97,56	90.57
		24	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	persen	60,48	73,40	64,23	87.51	80	80.29
			Angka Putus Sekolah:							
		25	Angka Putus Sekolah SD/MI	persen	0,19	0,15	0,05	33.33	0,14	164.29
		26	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	persen	0,35	0,61	0,24	160.66	0,57	157.89
	27	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	persen	0,40	0,82	0,13	184.15	0,81	183.95	
		Angka Kelulusan:								

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capain		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		28	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	100	99,91	99,99	99.92	99,98	99.99
		29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	99,98	99,96	99,77	100.19	99,99	99.78
		30	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	99,95	99,10	99,90	100.81	99,98	99.92
			<i>Rerata Nilai UN :</i>							
		31	Rerata Nilai UN SD/MI	nilai	7,845	7,70	7,59	98.57	7,75	97.94
		32	Rerata Nilai UN SMP/MTs	nilai	5,813	6,46	5,78	89.47	6,49	89.06
		33	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	nilai	6,106	7,14	5,77	80.81	7,18	80.36
		34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	84,16	85,00	87,42	102.85	88	99.34
			<i>Angka Melanjutkan :</i>							
		35	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	persen	90,57	89,42	91,78	102.64	89,62	102.41
		36	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	persen	76,33	69,87	79,18	113.32	71,55	110.66
		37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	persen	75,52	82,61	85,58	103.60	86,74	98.66
		38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	persen	81,80	88,57	90,70	102.40	91,43	99.20
4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	39	Jumlah Organisasi Pemuda	organisasi	25	26	26	100.00	27	96.30
		40	Jumlah Organisasi Olah Raga	organisasi	28	33	29	87.88	36	80.56
		41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	9	18	17	94.44	19	89.47
		42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	kegiatan	6	24	24	100.00	24	100.00
		43	Lapangan Olah Raga	permil	0,18	1	0.02	2.00	2	1.00
5	Meningkatnya Penguasaan	44	Jumlah Perpustakaan	unit	791	773	793	102.59	815	97.30

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capain		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	55.854	43.576	39.967	91.72	45.335	88.16
		46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	persen	2,11	2.15	2.16	100.47	2.24	96.43
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	persen	1,94	2.52	1,88	74.60	2,56	73.44
		48	Rasio KDRT	persen	0,009	0.026	0,017	65.38	0,024	70.83
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	persen	100,00	100	75	75.00	100,00	75.00
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	unit	39	34	39	114.71	39	100.00
		51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	persen	30,49	17.4	28,95	166.38	100	28.95
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	kali	81	38	38	100.00	38	100.00
		53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	unit	25	18	27	150.00	18	150.00
		54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	persen	66,75	66,85	66,85	100.00	70,00	95.50
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	persen	22,47	17	20	117.65	19,00	105.26
		56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	persen	81,99	28.23	28,24	100.04	39,52	71.46
		57	Jumlah LSM	LSM	5	4	4	100.00	6	66.67
B. MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing										
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi	58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	persen	75,14	75.47	75.46	99.99	76.65	98.46
		59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja	persen	0,53	1.28	1.34	104.69	1.28	100.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD
					Target	Realisasi	% Capain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Angkatan Kerja	Per Tahun							
		60 Pencari Kerja yang Ditempatkan	persen	19,94	38.42	43.31	112.73	54.27	70.79
		61 Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,84	3.16	3.21	101.58	3.02	104.64
		62 Keselamatan dan Perlindungan	persen	80,32	75	75	100.00	79	94.94
		63 Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	100.00	100	100.00
2	Membbaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	64 Persentase Koperasi Aktif	persen	80,41	77.76	82,76	141.99	78,18	105.86
		65 Jumlah UKM non BPR/LKM	UKM non BPR/ LKM	106.2	106.391	106.2	99.82	106.384	99.83
		66 Jumlah BPR/LKM	BPR/LKM	372	375	297	79.20	382	77.75
		67 Usaha Mikro dan Kecil	persen	1,57	0.36	1.017	282.50	0,38	267.63
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	68 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor	518	1.005	730	55,94	1,164	44,50
		69 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	490.94	605.681	1.030.689	89,88	724,647	67,75
		70 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	persen	14,64	25.19	11,37	65,98	31,19	46,94
		71 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	milyar rupiah	14.71	254	539.75	12,68	359	4,10
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju	72 Ketersediaan Pangan Utama Beras	persen	287,25	188.04	287.172	100.00	188.1	152.67

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capain		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah		87,2	91.5	87,10	100.00	87.5	99.54
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar							
		74	Produktivitas Padi	Kw/ha	63,42	60.08	62,90	104.69	60.1	104.66
		75	Produksi Padi	Ton/th	422.153	355.534	483.331	135.95	355.676	135.89
		76	Produktivitas Jagung	Kw/ha	59,00	59.25	58,73	99.12	59.3	99.04
		77	Produksi Jagung	Ton/th	71.896	74.277	55.083	74.16	74.337	74.10
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	persen	19,90	21.75	22,78	104.74	20.03	113.73
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	persen	33,91	72.61	72,83	100.30	71.84	101.38
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	persen	6,21	7.46	5,25	70.38	7.73	67.92
		81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	20,77	12.64	17,65	139.64	13.09	134.84
		82	Cakupan Bina Kelompok Petani	persen	22,06	2.3	2.6	113.04	14.9	17.45
			Produksi Hewan ternak							
		83	Sapi potong	kg	1.767.047	1.789.859	1.791.694	100.00	1,862,169	96.00
		84	Kerbau	kg	561	520	520	100.00	541	96.00
		85	Kambing	kg	749.409	762.462	749.957	98.36	793,265	94.54
		86	Domba	kg	1.053.382	1.072.305	1.053.911	98.28	1,115,626	94.47
			Produksi Hewan Unggas							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capain		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		87	Ayam Pedaging	ton	9.410.958	9,570,500	9,417,335	90.84	9,957,100	94.58
		88	Ayam Ras Petelur	ton	963.654	980,000	967,668	98.74	1,019,500	94.92
		89	Ayam Buras	ton	1.164.957	1,191,830	1,170,022	98.17	1,239,980	94.36
		90	Itik	ton	89.567	90,451	90,445	100.00	94,106	96.11
		91	Sapi Perah	liter	715.239	717.184	725.679	101.00	746,158	97.00
			Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)							
		92	Daging	gr/kap/hr	5,45	5.75	5,87	102.09	6.2	94.68
		93	Telur	gr/kap/hr	3,68	4.1	3,97	96.83	4.65	85.38
		94	Susu	gr/kap/hr	0,023	0.06	0,02	33.33	0.11	18.18
6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	95	Produksi Perikanan (Benih)	juta ekor	1.419.97	1,500,000	1,717,550	114.50	2,000,000	85.88
		96	Produksi Perikanan Budidaya	ton	17.483.12	16,000,000	21,058,460	131.62	18,000,000	116.99
		97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	ton	282.98	243.68	275.9	113.22	263.57	104.68
		98	Konsumsi Ikan	Kg/kap/tahun	15.5	15	18.61	124.07	15.75	118.16
		99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	persen	3.16	2.55	2.82	110.59	3.16	89.24
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	persen	13,44	10.04	13.41	133.57	9.98	134.37
		101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	Juta US\$	88.5	88.5	99.89	89.00	99.44	88.50
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	persen	2,056	2.06	114.22	13.55	15.17	2.06
8	Makin Optimalnya	103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	persen	0,65	2,81	0,72	23,13	2,81	23,13

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capain		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	persen	18,94	18,11	22,66	104,12	17,95	105,51
		105	Pertumbuhan Industri.	persen	3,67	3,76	2,88	97,6	3,76	97,6
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	106	Kunjungan Wisata Manca Negara	orang	413.306	607.689	337.515	55,54	860.549	39,21
		107	Kunjungan Wisata Nusantara	orang	4.753.255	5.392.611	4.510.363	83,64	6.594.051	68,40
		108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	persen	4,10	6,36	4,3	67,61	6,89	62,41
C. MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah										
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	66,98	69,25	73,63	106,32	69,73	105,59
		110	Rasio Jaringan Irigasi	persen	30,57	30,57	41,31	135,13	30,57	135,13
		111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	61,22	62,7	64,55	102,95	67,40	95,77
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	persen	80,38	82	81,42	99,29	84,20	96,70
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	persen	0,29	2,55	2,24	87,84	2,45	91,43
		114	Rumah Layak Huni (%)	persen	54,23	75	56,7	75,60	85,00	66,71

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capain		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	115	Persentase Pertambangan Berijin	persen	16, 22	30	NA	NA	50,00	NA
		116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	persen	2,90	2,63	4,35	165.40	2.64	164.77
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	orang	3.286.049	3.705.271	2.794.562	75.42	3.705.271	75.42
		118	Jumlah Ijin Trayek	ijin	1.143	1.036	1.089	105.12	1.069	101.87
		119	Rasio Uji Kir Kendaraan	persen	97,32	95.5	98,39	103.03	96,7	101.75
		120	Jumlah Terminal Bis	terminal	7	7	6	85.71	8	75.00
		121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	menit	32	32	32	100.00	32	100.00
		122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji		Ada	Ada	Ada	100.00	ada	100.00
		123	Pemasangat Rambu-Rambu	persen	61,24	75	106,36	141.81	94,00	113.15
D. MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup										
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	persen	>30	>30	31	103.33	>30	103.33
		125	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	persen	0,82	3.7	3,6	97.30	4,00	90.00
		126	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	persen	0	0	0	100.00	0	100.00
		127	Luas Kawasan Lindung (ha)	ha	25.886	25. 886	25. 886	100.00	25.886	100.00
		128	Luas Kawasan Budidaya (ha)	Ha	86.405	82.687	82.687	100.00	82.687	100.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capain		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		129	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	IMB	384	613	577	94.13	676	85.36
		130	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	persen	32	38	35	92.11	38	92.11
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	131	Persentase Penanganan Sampah	persen	25,62	27	28,14	104.22	31	90.77
		132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	persen	2,15	2.1	2,85	135.71	2,10	135.71
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	persen	35	25	33,06	132.24	30,00	110.20
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	persen	0,98	0,78	0,99	126.92	1,08	91.67
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	m ³	168.376	100	186.585	186.59	2.300.000	0.01
3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	ha	1.834	2.538	NA	NA	2.822	NA
		137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	persen	NA	4.75	3,92	NA	4,66	NA
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis									
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,	138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD	
					Target	Realisasi	% Capain			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
		140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
		141	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100,00	100,00	89,19	89,19	100,00	89,19
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	142	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		0,41	0,44	0,39	88.64	0,44	88.64
		143	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		90,70	98,41	91,32	92.80	95.54	95.58
		144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah		2	4	2	50.00	4	50.00
		145	Penegakan PERDA	persen	75,00	75	80,45	107.27	12,02	107.27
		146	Persentase Peningkatan PAD	persen	8,23	12,02	7,42	61.73	75	9.89
		147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada	ada	Ada	100.00	Ada	100.00
		148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	ada	Ada	100.00	Ada	100.00
		149	Buku "PDRB Kabupaten"		Ada	ada	Ada	100.00	Ada	100.00
		150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	persen	70	72.87	85	116.65	72.87	116.65
151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	orang	326	535	421	78.69	535	78.69		
3	Meningkatnya Hubungan	152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	penyiaran	8 radio	6	8/10	120.00	6	120.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD	
					Target	Realisasi	% Capain			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak			lokal / 1 tv lokal						
		153	Web Site Milik Pemerintah Daerah		Ada	ada	Ada	100.00	Ada	100.00
		154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal		10/3	9/3	9/3	95.00	9/3	95.00
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Cakil	155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	persen	952.609	91,79	88,66	96,59	91,84	96.54
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	persen						
		157	Rasio Pasangat Berakte Nikah	persen	13.809	93,37	86,44	92,58	100,00	86.44
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK							
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	persen						
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	persen	Sudah	sudah	Sudah	100.00	Sudah	100.00
F. MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat										
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	kegiatan	9	12	12	100.00	12	100.00
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	kegiatan	6	10	7	70.00	12	58.33
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	persen	70,00	80	70	87.50	100	70.00
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	persen	100,00	100	100	100.00	100	100.00
		165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	persen	70,00	80	70	87.50	100	70.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhadap target akhir RPJMD
						Target	Realisasi	% Capain		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	persen	100,00	100	100	100.00	100	100.00
Rata-Rata Capaian Indiaktor Mikro :								102.13		96.11

Sumber : Bagian Organisasi 2018, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas dalam capaian kinerja sasaran pada indikator mikro kepala daerah tahun 2017 rata-rata kinerja sasaran telah tercapai 102,13% dengan kriteria sangat tinggi, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh dimana capaian kinerja sasaran telah tercapai 96,11% dengan kriteria sangat tinggi, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator mikro sasaran startegis telah tercapai bahkan terlampaui pada target tahun 2017 dan target akhir periode RPJMD pada tahun 2019 hampir tercapai.

Realisasi anggaran per program Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2017 secara detail pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22,783,267,700	20,642,501,370	90.60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136,681,374,893	113,699,596,473	83.19
3	Program peningkatan disiplin aparatur	593,814,000	543,842,970	91.58
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4,001,036,375	3,637,462,394	90.91
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,360,133,100	1,281,177,745	94.20
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7,982,912,400	7,501,539,235	93.97
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15,164,288,321	8,852,153,580	58.38
8	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	110,000,000	106,005,660	96.37
9	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	635,000,000	626,474,040	98.66
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	700,934,000	667,208,229	95.19
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	347,200,000	340,181,780	97.98
12	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,728,244,000	1,472,861,889	85.22
13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	512,528,000	465,382,230	90.80
14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	29,735,606,632	24,059,095,033	80.91
15	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana, Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	19,375,345,463	15,367,221,606	79.31

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
16	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru Dan RS Mata	44,946,546,900	25,243,896,524	56.16
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	19,000,000	16,599,600	87.37
18	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	21,961,600	21,120,600	96.17
19	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	3,379,994,000	63,470,500	1.88
20	Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	171,649,335,782	116,443,104,459	67.84
21	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	3,000,000	2,999,990	100.00
22	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	255,433,000	255,363,000	99.97
23	Program Keluarga Berencana	2,285,956,235	2,056,976,475	89.98
24	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	74,300,000	74,299,400	100.00
25	Program Pelayanan Kontrasepsi	434,495,000	385,135,600	88.64
26	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	48,500,000	48,314,600	99.62
27	Program Pendidikan Anak Usia Dini	728,200,335	685,271,645	94.10
28	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	197,466,972,597	185,144,642,551	93.76
29	Program Pendidikan Menengah	0	0	0.00
30	Program Pendidikan Tinggi	0	0	0.00
31	Program Pendidikan Non Formal	1,970,845,000	1,720,913,190	87.32
32	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4,253,586,700	4,094,341,470	96.26
33	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	22,566,168,380	21,762,268,776	96.44
34	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	616,000,000	493,308,573	80.08
35	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	368,000,000	287,307,020	78.07
36	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	403,095,000	391,579,900	97.14
37	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	310,000,000	303,430,710	97.88
38	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga	2,454,825,000	2,404,602,800	97.95
39	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	15,702,425,000	1,496,655,949	9.53
40	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	993,336,150	754,904,420	76.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
41	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	206,926,000	200,055,075	96.68
42	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	401,100,000	354,800,100	88.46
43	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	309,800,000	295,953,664	95.53
44	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pegasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30,000,000	29,999,925	100.00
45	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1,012,425,000	989,314,828	97.72
46	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2,139,176,000	1,990,626,545	93.06
47	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	370,300,000	324,115,030	87.53
48	Program Pembinaan Anak Terlantar	100,000,000	97,259,345	97.26
49	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	253,507,000	247,122,335	97.48
50	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	20,000,000	15,399,950	77.00
51	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)	36,890,000	36,504,410	98.95
52	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	3,017,553,500	2,907,204,180	96.34
53	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,273,028,000	1,263,429,260	99.25
54	Program Pengembangan Nilai Budaya	2,305,927,000	2,171,975,895	94.19
55	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	288,883,000	268,698,020	93.01
56	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4,509,092,500	4,201,043,263	93.17
57	Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1,495,612,000	1,353,494,615	90.50
58	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,340,739,000	1,262,714,375	94.18
59	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	996,717,300	963,907,705	96.71
60	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,844,858,000	2,641,700,608	92.86
61	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1,695,453,000	1,596,865,371	94.19

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
62	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	288,759,000	281,497,760	97.49
63	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	482,704,500	447,540,787	92.72
64	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	403,095,000	391,579,900	97.14
65	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	864,929,100	829,691,496	95.93
66	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	267,676,000	241,636,640	90.27
67	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	639,607,000	480,405,959	75.11
68	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	298,516,300	295,255,425	98.91
69	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	545,594,800	514,745,705	94.35
70	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, Dan Prasarana Daerah	57,003,000	56,270,375	98.71
71	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1,179,267,500	1,071,791,160	90.89
72	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	21,046,994,098	12,896,718,140	61.28
73	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	932,732,400	794,429,260	85.17
74	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	542,299,000	534,099,025	98.49
75	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	1,211,597,000	1,162,104,565	95.92
76	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	561,998,500	537,238,955	95.59
77	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2,241,582,500	2,088,029,480	93.15
78	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	762,450,000	658,603,175	86.38
79	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	60,000,000	57,990,100	96.65
80	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	975,611,200	970,187,405	99.44
81	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	464,422,000	443,747,760	95.55
82	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	253,372,500	244,854,140	96.64
83	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perdagangan	52,779,794,500	48,037,118,757	91.01
84	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	1,058,397,965	1,025,319,182	96.87
85	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	231,858,500	227,295,600	98.03

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
86	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	298,516,300	295,255,425	98.91
87	Program Pembinaan Pedagang Kakilima/ Asongan	4,265,150,000	3,567,137,931	83.63
88	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	22,005,000	22,005,000	100.00
89	Program Penataan Struktur Industri	3,296,122,000	2,784,103,250	84.47
90	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1,410,893,000	1,083,789,941	76.82
91	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7,699,158,850	4,677,806,135	60.76
92	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,268,814,000	1,260,543,283	99.35
93	Program Pengembangan Kemitraan	369,330,000	341,450,685	92.45
94	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	132,586,251,140	109,125,886,268	82.31
95	Program Pembangunan Drainase/Gorong Gorong	10,019,921,000	7,676,133,145	76.61
96	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	49,224,847,679	45,517,788,529	92.47
97	Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan	86,798,000	52,907,500	60.95
98	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	1,119,787,550	1,076,628,206	96.15
99	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	35,024,614,549	28,731,007,483	82.03
100	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	9,014,684,720	8,418,240,488	93.38
101	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	192,100,000	189,108,610	98.44
102	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	403,900,000	391,102,400	96.83
103	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	929,911,000	805,981,311	86.67
104	Program Pengembangan Data/ Informasi Jaringan Irigasi Dan Sumber Daya Air	143,375,000	139,839,738	97.53
105	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	7,785,912,920	7,359,719,635	94.53
106	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37,501,825,000	24,104,704,247	64.28
107	Program Pengembangan Perumahan	1,466,872,975	1,336,595,896	91.12
108	Program Lingkungan Sehat Perumahan	601,040,500	571,501,053	95.09
109	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	813,301,000	718,408,376	88.33
110	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan	356,300,000	301,382,075	84.59

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Fasilitas LLAJ			
111	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	913,921,850	826,962,330	90.49
112	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	286,000,000	279,796,505	97.83
113	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	701,050,000	419,293,785	59.81
114	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	203,167,000	199,605,900	98.25
115	Program Perencanaan Tata Ruang	742,740,000	693,405,737	93.36
116	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	433,577,000	372,299,346	85.87
117	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	22,182,457,000	10,538,905,945	47.51
118	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	3,508,715,587	3,417,062,687	97.39
119	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	265,000,000	254,243,866	95.94
120	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	6,667,991,000	6,537,373,375	98.04
121	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,803,304,500	2,672,013,500	95.32
122	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	229,821,101	211,859,500	92.18
123	Program Pegelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	359,726,000	356,118,590	99.00
124	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Tawar	43,500,000	36,003,300	82.77
125	Program Pengembangan Kapasitas Dan Kemampuan Laboratorium Lingkungan	110,000,000	81,610,850	74.19
126	Program Pengembangan Data /Informasi	826,305,810	759,931,500	91.97
127	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,581,589,425	1,524,368,174	96.38
128	Program Kerjasama Pembangunan	175,000,000	163,284,331	93.31
129	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	336,756,000	320,109,373	95.06
130	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	314,448,000	308,569,155	98.13
131	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	968,622,000	859,093,690	88.69
132	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	53,758,750	50,319,000	93.60
133	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	70,000,000	62,026,798	88.61

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
134	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20,403,253,430	18,428,578,636	90.32
135	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	3,190,942,200	2,198,359,000	68.89
136	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	2,211,284,000	2,051,732,605	92.78
137	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	4,001,036,375	136,857,110.00	3.42
138	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	1,411,445,000	1,375,860,618	97.48
139	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	607,966,000	576,786,495	94.87
140	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	1,094,323,000	981,285,230	89.67
141	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2,585,505,750	2,447,515,152	94.66
142	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	79,790,000	67,978,759	85.20
143	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2,005,749,380	1,630,453,933	81.29
144	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	22,422,000	14,471,446	64.54
145	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	21,854,971,500	18,351,960,600	83.97
146	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	120,725,151	117,746,098	97.53
147	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1,425,000	1,415,000	99.30
148	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	1,335,595,500	1,295,684,932	97.01
149	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	160,400,000	155,202,880	96.76
150	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	216,000,000	213,131,400	98.67
151	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	53,426,000	51,106,050	95.66
152	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	231,877,700	223,986,000	96.60
153	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa	3,906,891,500	3,377,740,737	86.46
154	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	657,585,000	620,722,965	94.39
155	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	2,708,948,775	2,303,048,547	85.02

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
156	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6,780,386,380	5,384,596,507	79.41
157	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	248,440,000	240,786,990	96.92
158	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	30,000,000	25,132,300	83.77
159	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	569,266,000	545,266,900	95.78
160	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	3,552,383,000	3,172,368,936	89.30
161	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	898,292,000	853,767,337	95.04
162	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	276,535,000	248,660,498	89.92
163	Program Pendidikan Politik Masyarakat	135,000,000	133,745,606	99.07
164	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1,343,878,380	1,324,029,950	98.52
165	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	380,134,000	324,594,000	85.39
166	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	37,360,000	37,359,850	100.00
167	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	173,632,000	144,398,980	83.16
JUMLAH :		1,254,128,725,778	1,011,004,215,485	80.61

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang 2018, data realisasi keuangan unaudited diolah.

Pada tahun anggaran 2017 terdapat 2 program yang tidak mendapatkan anggaran dalam APBD Kabupaten Magelang, yaitu Program Pendidikan Menengah dan Program Pendidikan Tinggi.

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2017 mencapai rata-rata 80,61% dengan kriteria Tinggi. Tingkat capaian terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi (91% \leq 100%) dengan jumlah program 99 (59,28%) indikator dan yang paling sedikit pada katagori capaian sedang (66 % \leq 75%) sebanyak 4 (2,40%) indikator, secara detail rekapitulasi realisasi anggaran per program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Program
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	99 (59,28%)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	50 (29,94%)
3	66 % ≤ 75%	Sedang	4 (2,40%)
4	51% ≤ 65%	Rendah	8 (4,79%)
5	≤ 50	Sangat Rendah	6 (3,59%)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang 2018, data diolah.

B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Magelang Tahun 2017, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2017 terhadap indikator makro sejumlah 6 (enam) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja serta indikator mikro sejumlah 31 (tiga puluh satu) sasaran strategis dan 166 (seratus enam puluh enam) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bupati Magelang Tahun 2017 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Magelang. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun IV (keempat) dari RPJMD Kabupaten Megelang 2014-2019.

Capaian kinerja Bupati Magelang tahun 2017 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, evaluasi kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis pada indikator makro dan indikator mikro.

Evaluasi pencapaian kinerja pada indikator makro per-sasaran strategis tahun 2017 sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis I** : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat

Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Kepala Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2017.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	Capaian 2017			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	73,27	70,45	73,27	104,00	70,56	103,84
2	Indeks Gini *)	indeks	0,34	0,305	0,31	98,36	0,295	94,92
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	indeks	0,4073	0,4066	0,41	100,84	0,4046	98,67
4	Persentase penduduk miskin *)	persen	13,07	9,99	12,42	75,68	8,00	44,75
5	IPM	indeks	67,92	75,14	74,74	99,47	75,94	98,42
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						95,67		88,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang 2018, data diolah

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan agama yang semakin meningkat terhadap 5 indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2017 sebesar 95,67 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 88,12% dengan capaian tinggi.

Pada pencapaian target kinerja sasaran terdapat satu indikator yaitu indikator persentase penduduk miskin masuk katagori sedang nilai capaian kinerja 75,68% terhadap target kinerja tahun 2017, sedangkan terhadap target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2019 masuk katagori sangat rendah dengan capaian indikator 44,75%. Secara detail penjelasan capaian kinerja sasaran pada masing-masing indikator sebagai berikut :

a. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan indikator dampak (output) dari angka kematian bayi sebagai sasaran pembangunan. Angka kematian bayi sendiri dipengaruhi oleh cakupan imunisasi, penolong persalinan dan lain sebagainya (merupakan indikator proses).

Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayat. Angka ini dapat dihitung dengan bantuan tabel kematian (*life table*) dan beberapa program paket komputer. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan “lama hidup” dan “hidup sehat”.

Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, apabila membicarakan usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari pembicaraan upaya peningkatan derajat kesehatan.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2017 adalah 73,27 tahun. Artinya pada Tahun 2017 seorang penduduk Kabupaten Magelang akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 73,27 tahun. Dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 70,56 capaian kinerja pada indikator Angka Harapan Hidup telah melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian 104% masuk dalam katagori sangat tinggi.

Angka Harapan Hidup pada tahun 2017 jika dibanding dengan tahun 2016 tidak terdapat peningkatan angka harapan hidup, sedangkan jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD telah melampaui target dengan capaian kinerja 103,84 dengan kriteria sangat tinggi.

Angka Harapan Hidup yang cukup tinggi tersebut merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kebiasaan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat pada seluruh masyarakat. Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini deteksi kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

b. Indikator Indeks Gini

Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien gini dihitung dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok

sesuai dengan tingkat pendapatannya, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan.

Bank Dunia menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

- a. Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0.4$
- b. Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0.4 - 0.5$
- c. Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0.5$

Berdasarkan kriteria tersebut capaian indeks gini pada tahun 2017 sebesar 0,31 masuk dalam katagori ketimpangan taraf rendah. Jika dibandingkan dengan target capaian tahun 2017, maka capaian kinerja indeks gini belum tercapai dengan capaian 98,36%, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 belum tercapai yaitu capaian kinerja indeks gini sebesar 94,92%.

c. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam dan jumlah penduduk per kecamatan.

Indeks Williamson pada dasarnya adalah salah satu bentuk modifikasi dari koefisien variasi, yaitu salah satu ukuran statistik untuk menghitung tingkat sebaran data. Data dengan standar deviasi yang tinggi (nilainya mendekati 1), mengindikasikan adanya variasi yang cukup tinggi atau dengan kata lain ada ketidakmerataan sebaran data.

Dengan mengasumsikan data PDRB perkapita kecamatan sebagai pendekatan dari pendapatan perkapita, metode ini dapat diaplikasikan untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan per kapita antar kecamatan. Semakin tinggi variasi datanya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya ketimpangan pendapatan antar kecamatan. Rentang nilai indeks adalah dari nol sampai satu. Idealnya, diharapkan nilai indeks yang mendekati angka nol, yang bermakna pada tingkat pemerataan pendapatan yang semakin

baik. Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Indeks gini Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 0,41, angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan di Kabupaten Magelang masuk dalam katagori sedang. Jika dibandingkan terhadap capaian target pada tahun 2017 telah mencapai kinerja sangat tinggi dengan persentase capaian sebesar 100,84%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2019 belum mencapai kinerja sangat tinggi dengan persentase capaian sebesar 98,67%

d. Persentase Penduduk Miskin

Sesuai data terakhir BPS yang dirilis pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sejumlah 157.150 jiwa (12,42%), mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jumlah penduduk miskin tahun 2016 sebesar 158.900 jiwa (13,07 %).

Jika dilihat dalam rentang 2 (dua) tahun terakhir, walaupun angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Target di RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebesar 9,99% masih belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan pada sampai dengan tahun 2017 belum berjalan baik.

Adapun data penduduk miskin selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.7
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Penduduk miskin (%)	12,98	12,67	13,07	12,42
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	160,480	162,380	158.900	157.150
Garis Kemiskinan (Rp/kapita bulan)	246,292	253,866	271.800	281.237
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,07	1,60	1,84	1,67
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,47	0,32	0,44	0,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang 2018, data diolah

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya melalui upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun pengembangan akses sarana dan prasarana penunjang perekonomian .

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Magelang tahun pada 2017 telah mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir indek P1 mengalami fluktuasi. Capaian tahun 2017 adalah 1,67%, turun dari tahun 2016 sebesar 1,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan lebih dekat daripada tahun sebelumnya.

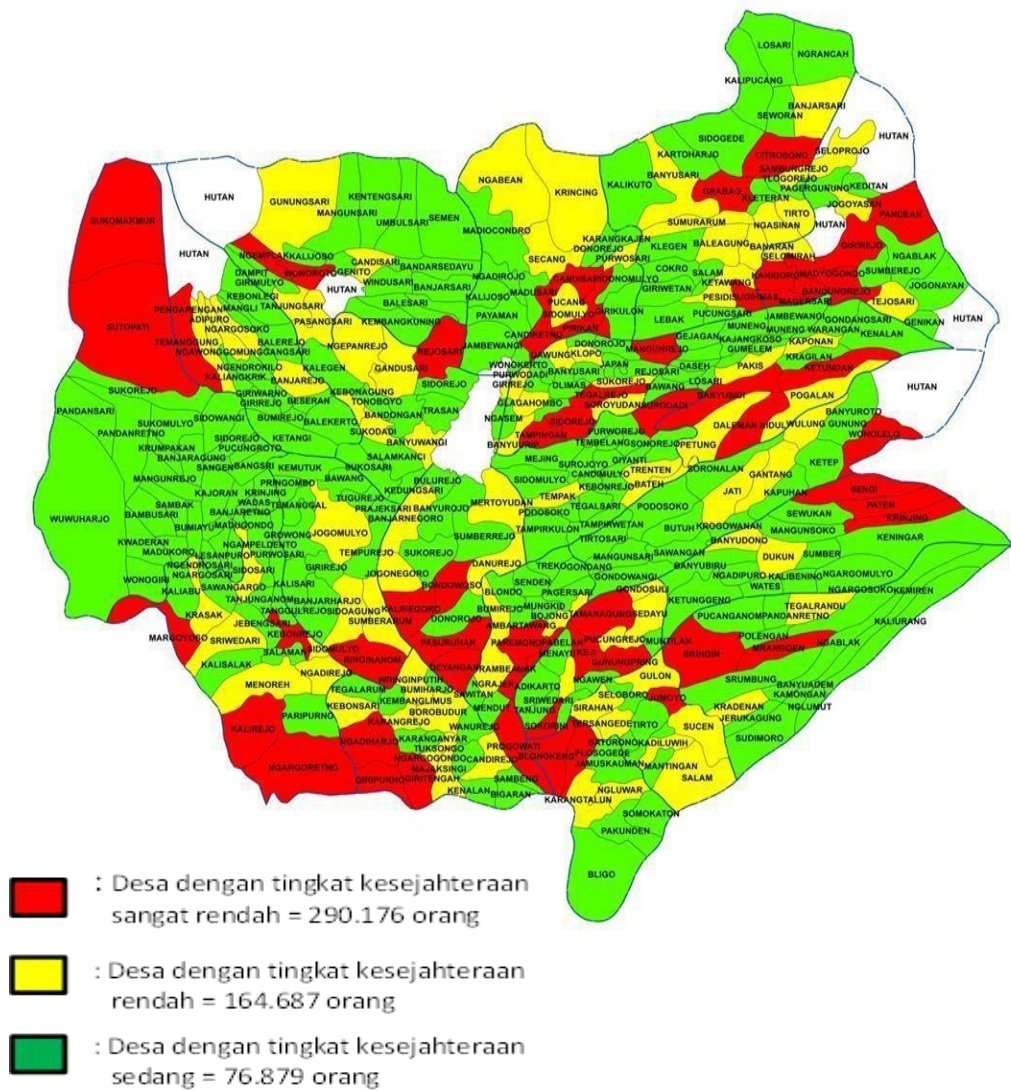
Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Magelang selama periode lima tahun terakhir jika dilihat dari data di atas juga terlihat fluktuatif. Tahun 2017 capaian P2 di kabuapten Magelang menunjukkan capain terendah selama rentang lima tahun terakhir, yaitu berada pada angka 0,31%. Indeks tertinggi terjadi pada tahun 2014, sebesar 0,47%

Guna mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang, Bappeda Propinsi Jawa Tengah telah melakukan pemetaan prioritas lokasi intervensi program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan di 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Pemetaan lokasi prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan mendasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 yang telah diolah. Sehingga di setiap kecamatan di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Magelang akan diklasifikasikan menurut 3 (tiga) kategori yang dianalisis berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan terendah, dan total jumlah penduduk (menggunakan metode interval).

Dari hasil pemetaan prioritas intervensi lokasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Desa dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah/merah sebanyak 94 desa;
2. Desa dengan tingkat kesejahteraan rendah/kuning sebanyak 151 desa;
3. Desa dengan tingkat kesejahteraan sedang/hijau sebanyak 127 desa.

Peta desa dengan tingkat kemiskinan tinggi di Kabupaten Magelang pada tahun 2017, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 3.1
Peta Desa Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Tahun 2017

Jumlah dan nama desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Jumlah Desa yang Tergolong dalam
Tingkat Kemiskinan Tinggi dan Tingkat Kesejahteraan
Sangat Rendah Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa
1	Bandongan	Gandusari, Kebonagung, Ngepanrejo, Salamkanci
2	Borobudur	Bumiharjo, Giripurno, Giritengah, Kebonsari, Kenalan, Ngargogondo
3	Candimulyo	Bateh, Kebonrejo, Podosoko, Purworejo, Sidomulyo, Trenten
4	Dukun	Krinjing, Paten, Wates
5	Grabag	Citroso, Kartoharjo, Ngrancah, Pesidi, Sambungrejo, Sugihmas, Tirto
6	Kajoran	Pandanretno
7	Kaliangkrik	Banjaretno, Kebonlegi, Mangli, Munggangsari, Ngargosoko, Pengarengan, Selomoyo
8	Mertoyudan	Deyangan, Pasuruhan
9	Mungkid	Gondang, Ngrajek, Paremono, Progowati, Rambeanak
10	Muntilan	Adikarto, Congkrang, Sriwedari
11	Ngablak	Keditan, Madyogondo, Magersari, Seloprojo
12	Ngluwar	Blongkeng, Karangtalun, Plosogede
13	Pakis	Daleman Kidul, Gondangsari
14	Salaman	Kalirejo, Ngargoretno, Paripurno, Purwosari, Sawangargo, Tanjunganom
15	Salam	Kadiluwih, Mantingan, Tersangede
16	Sawangan	Soronalan, Wulunggunung
17	Secang	Candiretno, Donomulyo, Girikulon, Karangkajen, Madusari, Pirikan, Purwosari, Sidomulyo
18	Srumbung	Mranggen, Ngargosoko, Pandanretno
19	Tegalrejo	Banyusari, Mangunrejo, Ngasem, Tampingan
20	Tempuran	Bawang, Girirejo, Growong, Kemutuk, Pringombo, Ringinanom, Tugurejo
21	Windusari	Candisari, Dampit, Genito, Gunungsari, Mangunsasri, Ngemplak, Pasangsari, Wonoroto

Sumber : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2017

Adapun arahan strategis untuk pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2019 agar lebih tepat sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar diarahkan pada sasaran dan lokasi prioritas berdasarkan BDT 2015.

2. Masih tingginya kemiskinan di daerah perdesaan, sehingga program penanggulangan kemiskinan agar diarahkan di perdesaan khususnya pemberdayaan di sektor pertanian (*On Farm dan Off Farm Oriented*)
3. OPD Provinsi diharapkan sinergis dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan
4. Tahun 2017 merupakan tahap akhir RPJMD 2014-2019, diharapkan program/kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, spasial).

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang telah disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan menetapkan strategi: kebijakan ekonomi makro, pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar, pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, dan pembangunan sarana prasarana wilayah. Pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar dimaksud meliputi:

1. Penyediaan dan perluasan akses pangan
2. Perluasan akses kesehatan
3. Perluasan akses layanan pendidikan
4. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
5. Perluasan akses layanan perumahan
6. Penyediaan air bersih dan sanitasi
7. Perluasan akses layanan tanah
8. Perluasan akses layanan SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan rasa aman
10. Perluasan akses partisipasi.

Dalam perluasan akses berpartisipasi ini terkandung maksud program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat miskin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

e. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah dengan menggunakan tolok ukur *Physical Quality of Life*

Index (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia.

IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran per kapita.

IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2017 mencapai 74,74 poin, meningkat signifikan sebesar 6,82 poin jika dibandingkan IPM tahun 2016 sebesar 67,92. Dalam RPJMD 2014-2019 IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 75,94 maka kinerja tahun 2017 telah mencapai 98,42% dari target yang ditetapkan. Data historis menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik.

IPM dihitung untuk mengungkapkan status pembangunan manusia. Dari nilai IPM Tahun 2017 yang sebesar 74,74 menjadikan Kabupaten Magelang masuk kategori “Tinggi” sesuai dengan katagori Badan Pusat Statistik untuk capaian nilai IPM berkisar antara $70 \leq \text{IPM} < 80$ masuk kategori pembangunan manusianya tinggi.

2. **Sasaran Strategis II** : Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah
 Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Kepala Daerah
 Kabupaten Magelang Tahun 2017.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	Capaian 2017			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,49	6,0-6,5	5,43	90,50	6,4 - 7,1	84,84
7	PDRB per kapita	Juta Rp	20,69	12,56	22,35	177,95	15,06	148,41
8	Laju inflansi	Persen	2,86	5±1	3,47	69,40	4±1	86,75
9	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	96,77	97,17	96,79	99,61	97,97	98,80

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	Capaian 2017			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Rp.(juta)	60,03	32,47	51,74	159,35	38,38	134,81
11	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	59,85	36,09	55,80	154,61	37,03	150,69
12	Nilai tukar petani		106,56	106,7	106,70	100,00	106,99	99,73
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						121,63		114,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang 2018, data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah terhadap 7 indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2017 sebesar 121,63 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 114,86 % dengan capaian sangat tinggi.

Pada pencapaian target kinerja sasaran terdapat satu indikator yaitu indikator laju inflasi masuk katagori sedang nilai capaian kinerja 69,40% terhadap target kinerja tahun 2017, sedangkan terhadap target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2019 masuk katagori tinggi dengan capaian indikator 86,75%. Secara detail penjelasan capaian kinerja sasaran pada masing-masing indikator sebagai berikut:

f. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat kemajuan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, semakin baik perekonomian.

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu baru mencapai 5,43 dimana target yang ditetapkan adalah 6,0 – 6,5 persen. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target pertumbuhan PDRB sebesar 6,4 – 7,1 persen capaian kinerja tahun 2017 baru mencapai 84,84%.

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,07 persen, Jawa tengah 5,27 persen, dan kabupaten

Magelang 5,29 persen. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi kabupaten Magelang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah.

Tabel 3.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang.
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2017 (%)

Tahun	Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2014	5,38	5,27	5,01
2015	5,03	5,47	4,88
2016	5,43	5,28	5,02
2017	5,29	5,27	5,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2018

g. PDRB Perkapita

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. PDRB per kapita didapatkan dari angka PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun.

PDRB perkapita pada tahun 2017 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai Rp. 22.350.000 dari target yang ditetapkan adalah Rp. 12.560.000. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019, target PDRB per kapita sebesar Rp. 15.060.000, maka capaian kinerja tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 148,41%.

h. Laju Inflasi

Angka inflasi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Sedang yang dimaksud dengan inflasi adalah angka yang menggambarkan perubahan (dalam persentase) indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu sebelumnya.

Pengertian Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum pada suatu periode waktu

dengan periode tertentu yang telah ditetapkan. Laju inflasi biasanya disebabkan antara lain oleh: perubahan ketersediaan uang di tangan masyarakat (*money supply*) sebagai akibat dari kebijakan moneter yang diambil bank sentral. kebijakan pemerintah tentang harga barang/jasa tertentu (*pricing policy*), kebijakan tentang subsidi, naik turunnya produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Laju inflasi pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu baru mencapai 3,47 (69,40%) dimana target yang ditetapkan adalah 5 ± 1 . Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target laju inflasi sebesar 4 ± 1 capaian kinerja tahun 2017 baru mencapai 86,75%.

Inflasi Kabupaten Magelang antara tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi sesuai harga-harga yang berlaku di masyarakat, namun tetap bergerak pada batas psikologis, yaitu kisaran satu digit. Laju inflasi pada level satu digit ini, menurut BPS, menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada tahun 2014-2017 masih dapat dikendalikan. Data inflasi selengkapnya bisa dilihat dalam Tabel 3.10 berikut ini :

Tabel 3.11
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2017

Tahun	Kab. Magelang	Prov. Jateng	Nasional
2014	7.91	8.22	8.36
2015	3.60	2.73	3.35
2016	2.86	2.36	3.02
2017	3,47	3,71	3,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang 2018, data diolah

Tabel di atas menunjukkan, meskipun laju inflasi di Kabupaten Magelang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi provinsi, namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan.

Apabila dilihat menurut kelompok pengeluaran selama periode 2014-2017 maka tingkat inflasi yang paling fluktuatif adalah kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi dan komunikasi. Terlihat bahwa kelompok bahan makanan mencapai

tingkat inflasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lain. Kelompok transport dan komunikasi yang mencapai inflasi tertinggi selama satu tahun, merupakan dampak dari kenaikan harga BBM. Adanya kenaikan tingkat harga bahan pangan, mengingat Kabupaten Magelang adalah daerah agraris atau penghasil bahan maka tingginya inflasi bukan sebagai musibah. Data inflasi menurut kelompok pengeluaran selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.12
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang
Tahun 2014 – 2017 (%)

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Umum	7.91	3.6	2.86	3.47
2	Bahan Makanan	13.02	3.80	6.25	2.15
3	Makanan Jadi	5.23	6.40	5.23	2.47
4	Perumahan	7.83	5.34	1.21	5.67
5	Sandang	3.44	2.23	2.53	2.77
6	Kesehatan	3.30	3.45	2.42	2.21
7	Pendidikan	2.36	2.67	0.80	2.64
8	Transport	10.48	-1.86	2,14	5.01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang 2018, data diolah

i. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2017 hampir mencapai target yang ditetapkan yaitu baru mencapai 96,79% (99,61%) dimana target yang ditetapkan adalah 97,17%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target rasio penduduk yang bekerja sebesar 97,97%, maka capaian kinerja tahun 2017 baru mencapai 98,80%.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Antara tahun 2015 hingga 2017 di Kabupaten Magelang terjadi peningkatan rasio penduduk yang bekerja. Hal ini sejalan dengan data pengangguran terbuka (tabel 3.12) yang terus menurun. Data perkembangan rasio penduduk yang bekerja selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Rasio penduduk yang bekerja Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	666.331	672.063	677.909	683.144
Kesempatan Kerja	639.264	646.021	654.072	661.203
Rasio penduduk yang bekerja	95,94	96,13	96,48	96,79

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Jika dipilah menurut umur tampak bahwa rasio penduduk yang bekerja pada permintaan tenaga kerja usia muda paling rendah. Sisi lain dari fakta ini adalah tersedianya peluang bagi peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan/atau pelatihan untuk meningkatkan daya saing, misalnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). karena biaya peluang (*opportunity cost*) pendidikan dan/atau pelatihan generasi muda terbukti rendah. Data perkembangan rasio penduduk yang bekerja menurut umur selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Rasio penduduk yang bekerja Menurut Umur Tahun 2016-2017

Golongan Umur	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja
15 – 19	39.416	33.254	84,37	39.157	33.309	85,07
20 – 24	50.468	46.075	91,30	50.960	46.803	91,84
25 – 29	65.763	64.078	97,44	66.793	65.264	97,71
30 – 34	83.922	82.043	97,76	84.604	83.120	98,25
35 – 39	76.873	75.859	98,68	77.704	76.715	98,73
40 – 44	88.578	83.683	94,47	89.203	84.803	95,07
45 – 49	78.673	76.852	97,69	79.149	77.411	97,80
50 – 54	66.248	65.381	98,69	66.859	66.052	98,78
55 – 59	40.550	39.657	97,80	40.730	39.909	97,98
60 +	87.420	87.187	99,73	87.985	87.817	99,81
Jumlah	677.909	654.072	96,48	683.144	661.202	96,79

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

j. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besar tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin berpengaruh bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 51,74% (159,35%) dimana target yang ditetapkan adalah 32,47%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target Pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 38,38%, maka capaian kinerja tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan mencapai 134,81%.

k. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan per kapita pada tahun 2017 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 58,8% (154,61%) dimana target yang ditetapkan adalah 36,09%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target Pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan per kapita sebesar 37,03%, maka capaian kinerja tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan mencapai 150,69%.

1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Nilai tukar petani pada tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 106,7% (100%) dimana target yang ditetapkan adalah 106,7%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target nilai tukar petani sebesar 106,99%, maka capaian kinerja tahun 2017 mendekati target yang ditetapkan dengan capaian 99,73%.

3. **Sasaran Strategis III** : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Kepala Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2017.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	Capaian			Akhir RPJMD (2019)	
			Target	Kinerja	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.0029	0.0021	0.0029	138.10	0.0017	170.59
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :					138.10		170.59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana daerah terhadap 1 indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan di tahun 2017 sebesar 138,10 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 170,59 % dengan capaian sangat tinggi, penjelasan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

m. Sasaran Strategis Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dasar bagi warga masyarakat meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan irigasi, bendung, penyediaan air bersih, perumahan layak huni dan sebagainya.

Kinerja makro Sasaran Strategis Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, drainase dalam kondisi baik, pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan lingkungan permukiman. Data historis pencapaian kinerja pekerjaan umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Kinerja Makro Sasaran Strategis Rasio Panjang Jalan
Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Panjang jalan Kabupaten (km)	887.83	887,83	1000,83	1.000,83
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	579.94	608.34	670,33	736,88
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (%)	65.32	68.52	66,98	73,63
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0.98	0.97	0.075	0,99
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air	43.83	44.08	47,03	50.591
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	710.010	107.735	111,41	113.083
Luas Jaringan Irigasi	35.693,45	35.693,45	35.693,45	35.693,45
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	20.025.00	21.268.05	21.344.68	22.499,36
Prosentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	56,10	59,59	61,22	64,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2017 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 0,0029 (138,10%) dimana target yang ditetapkan adalah 0,0021. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 0,0017, maka capaian kinerja tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan mencapai 170,59%.

4. **Sasaran Strategis IV** : Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan

Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Kepala Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2017.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	Capaian 2017			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
14	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	persen	80,13	76,4	83,09	108,76	95,66	86,86
15	Luas Wilayah Industri	persen	1,6	0,37	0,34	91,89	0,37	91,89
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						100,32		89,38

Sumber : Bappeda dan Litbangda 2018, data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan terhadap 2 indikator kinerja, telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2017 sebesar 100,32 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 89,38 % dengan capaian tinggi.

n. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Wilayah Kabupaten Magelang memiliki cukup banyak sumber air dari mata air yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Pemanfaatannya selama ini dilakukan oleh institusi maupun masyarakat sebagai sumber air bersih yang digunakan masyarakat sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian dan peternakan. Akses air minum tercatat untuk daerah perkotaan mencapai 80,88% dan di wilayah perdesaan mencapai 78,55%. Target cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan pada tahun 2016 tercatat 76,20%. Sedangkan target sampai tahun 2017 sebesar 76,40%.

Peningkatan cakupan air minum di wilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum/bersih. PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang memberikan pelayanan air bersih di Kabupaten Magelang adalah sebesar 20,83% dengan jumlah pelanggan sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebanyak 55.941 Sambungan Rumah (SR).



Gambar 3.2
PDAM Tirta Gemilang mendapatkan penghargaan sebagai
Perusahaan Terbaik Dalam Kinerja dan Pelayanan Memuaskan
Tahun 2017.

Kualitas air secara rutin dibawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 492/Menkes/ Per/IV/2010.

Peningkatan cakupan layanan air minum di wilayah perdesaan banyak dikelola oleh masyarakat baik melalui perpipaan maupun bukan perpipaan, pelayanan air minum perpipaan diwilayah perdesaan dibangun melalui program PAMSIMAS dan SPAM DAK.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih pada tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 83,09% (108,76%) dimana target yang ditetapkan adalah 76,4%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih sebesar 95,66%, maka capaian kinerja tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 86,86%.

o. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 0,34% (91,89%) dimana target yang ditetapkan adalah 0,37%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target luas wilayah industri sebesar 91,89%, maka capaian kinerja tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,37%.

Indikator luas wilayah industri bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB, kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhan industri serta jumlah kelompok pengrajin.

Tabel 3.18
Indikator Yang Mempengaruhi Luas Wilayah Industri
Kabupaten Magelang Tahun 2014–2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (industri pengolahan) (%)	18,77	18,80	18,94	19,38
Pertumbuhan Industri	6,03	7,8	3,7	2,88
Cakupan Bina Kelompok pengrajin	2,76	3,70	0,71	0,72

Sumber: *Disperinaker Kabupaten Magelang, 2018*

Kegiatan industri di Kabupaten Magelang terdiri dari beraneka macam dan tersebar di banyak kecamatan. Industri kecil dan menengah terbanyak adalah jenis industri kimia, agro dan hasil hutan. Sementara itu, untuk industri besar dan sedang yang terbanyak adalah industri makanan, minuman jadi dan tembakau serta industri macam-macam perhiasan, mainan anak-anak, cinderamata.

Secara spasial, potensi industri berbahan baku batu ada di Kecamatan Muntilan. potensi industri berbahan baku bambu ada di Kecamatan Borobudur, potensi industri sapu rayung ada di Kecamatan Mungkid, dan potensi industri kaleng bekas ada di Kecamatan Salaman. Sementara itu industri berbahan baku ketela berpotensi dikembangkan di Kecamatan Grabag, Mungkid dan Candimulyo dan industri gula kelapa potensial dikembangkan di Kecamatan Candimulyo.

Di Kabupaten Magelang juga terdapat beberapa sentra industri. Sentra industri yang menonjol di antaranya sentra industri kecil, kerajinan pahat batu di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, sentra industri makanan dari ketela (slondok) di Desa Sumurarum Kecamatan Grabag, sentra industri makanan jenang dodol krasikan di Desa Gulon Kecamatan Salam, sentra industri makanan dari beras ketan (tape ketan dan wajik) di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan dan Desa Salaman Kecamatan Salaman, industri kerajinan tanduk di Desa Pucang Kecamatan Secang, genting Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman, kaleng bekas di Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan dan Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman, industri mainan anak-anak di Desa Kalijoso Kecamatan Secang, industri kerajinan perak di Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dan industri kerajinan sangkar burung di Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran.

Peningkatan persaingan dunia industri menuntut peningkatan mutu produk serta fasilitasi pengenalan produk-produk Kabupaten Magelang ke pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah daerah harus senantiasa memberikan pembinaan kepada para pelaku industri dan memberikan fasilitas promosi keluar daerah, Selain itu, kendala lainnya adalah masih terbatasnya teknologi, desain, akses permodalan serta pemasaran IKM. Guna meningkatkan pengembangan usaha kecil pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen untuk memfasilitasi industri dan IKM secara optimal. Untuk lebih mengembangkan industri perlu strategi pengembangan lokalitas, sektor, sub sektor dan komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, antara lain melalui percepatan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

5. **Sasaran Strategis V** : Meningkatkan Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatkan manajemen sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Kepala Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2017.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	Capaian 2017			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
16	Lama Proses Perijinan (Hari)	hari	9	9	9	100,00	9	100,00
17	Opini BPK 'WTP'		WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
18	Nilai AKIP		CC	B	CC	50,00	B	50,00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						83,33		83,33

Sumber : Pemerintah Kabupaten Magelang 2018, data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis meningkatkan manajemen sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis terhadap 3 indikator kinerja, telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2017 sebesar 83,33 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 83,33 % dengan capaian sangat tinggi.

Pada pencapaian target kinerja sasaran terdapat satu indikator yaitu capaian nilai AKIP masih masuk katagori sedang nilai capaian kinerja 50% sedang terhadap target kinerja tahun 2017, maupun target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2019. Secara detail penjelasan capaian kinerja sasaran pada masing-masing indikator sebagai berikut:

p. Lama Proses Perijinan (Hari)

Investasi adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan- bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya.

Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha/investasi. masing-masing adalah memulai usaha (*starting business*), perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permit*), pembayaran pajak (*paying taxes*), akses perkreditan (*getting credit*), penegakan kontrak (*enforcing contract*), penyambungan listrik (*getting electricity*), perdagangan lintas negara (*trading across borders*), penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*), dan perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*).

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi yang relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudahan itu antara lain prosedur dan persyaratan, lamanya waktu dan biaya. Terkait kepastian biaya adalah tidak adanya pungutan diluar tarif yang resmi atau tidak ada pungli.

Kemudahan perijinan ini diwadahi dengan pembentukan PTSP (pelayanan perijinan satu pintu), yang diampu oleh DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu). DPM-PTSP diberi tugas untuk melakukan pembenahan seperti kemudahan perizinan, administrasi birokrasi pusat dan daerah, serta sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi perlu dilakukan karena saat ini masih terdapat berbagai regulasi daerah yang masih belum sejalan dengan kebijakan atau regulasi pemerintah pusat.

Persentase lama proses perijinan pada tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 9 hari (100%) dimana target yang ditetapkan adalah 9 hari. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target lama proses perijinan sebesar 9 hari, maka capaian kinerja tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

q. Opini BPK 'WTP'

Opini BPK 'WTP' pada tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai WTP (100%) dimana target yang ditetapkan adalah Opini BPK 'WTP'. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target Opini BPK 'WTP', maka capaian kinerja tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

Penghitungan Opini BPK 'WTP' untuk pengukuran indikator kinerja kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.20
Penghitungan Opini BPK 'WTP' Kabupaten Magelang
Tahun 2017.

No.	Kategori Opini	Bobot Nilai
1.	<i>Wajar Tanpa Pengecualian</i>	3
2.	<i>Wajar Dengan Pengecualian</i>	2
3.	<i>Tidak Wajar</i>	1
4.	<i>Tidak Menyatakan Pendapat</i>	0

Penghitungan capaian kinerja : Target = WTP; Realisasi = WTP

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah bobot nilai Realisasi}}{\text{Jumlah bobot nilai target}} \times 100 \\ &= \text{WTP/WTP} \times 100 \\ &= (3+2+1+0) / (3+2+1+0) \times 100 \\ &= 6/6 \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *up dating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Perwujudan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Magelang dengan diundangkannya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008), maka Perda Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2011), dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1037) akan disesuaikan dengan PP dimaksud.

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Magelang diarahkan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang serta salah satu faktor dalam pendukung pencapaian Opini BPK menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2016 indikator opini BPK “WTP” belum tercapai namun pada tahun 2017 ini opini BPK “WTP” dapat tercapai. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah daerah dalam mencapai indikator ini adalah:

- Melakukan pelatihan bagi petugas penyimpan barang di setiap SKPD, dan mengupayakan agar petugas yang sudah terlatih jangan sampai ikut dimutasi pada saat adanya perubahan OPD baru diakhir tahun 2016.
- Menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI Provinsi Jateng,
- Melaksanakan *Action Plan* yang telah dibuat oleh masing-masing bidang berdasarkan hasil rekomendasi BPK RI Provinsi Jateng,
- Kekhususan penanganan aset tetap yang menjadi Opini pengecualian BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

r. Nilai AKIP

Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 58,82 dengan katagori CC, dibandingkan dengan tahun 2016 dengan nilai 58,17 dengan katagori CC mengalami peningkatan sebesar 0,65 point, tetapi tidak mengalami peningkatan katagori, target nilai AKIP pada RPJMD adalah diatas 60 dengan katagori B.

Pengukuran indikator kinerja kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.21
Penghitungan Nilai AKIP Kabupaten Magelang Tahun 2017.

No.	Nilai SAKIP	Bobot Nilai
1	AA	6
2	A	5
3	BB	4
4	B	3
5	CC	2
6	C	1
7	D	0

Penghitungan capaian kinerja : Target B, Realisasi CC

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah bobot nilai Realisasi} \times 100}{\text{Jumlah bobot nilai target}} \\
 &= \text{CC/B} \times 100 \\
 &= (2+1+0) / (3+2+1+0) \times 100 \\
 &= 3/6 \times 100 \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

5. **Sasaran Strategis VI** : Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Tabel 3.22.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	Capaian			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
19	Angka kriminalitas *)	Indek	0,22	2,13	0,26	187,79	1,45	182,07
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						187,79		182,07

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018, data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis meningkatnya kondusifitas dan keamanan terhadap satu indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2017 sebesar 187,75 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 182,07 % dengan capaian sangat tinggi. Secara detail penjelasan capaian kinerja sasaran pada masing-masing indikator sebagai berikut :

s. Angka Kriminalitas

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kewaspadaan dini masyarakat. Indikator capaian untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang masuk di Polres Magelang.

Angka kriminalitas pada tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu mencapai 187,79%, dimana target yang ditetapkan adalah 2,13. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target angka kriminalitas sebesar 1,45, maka capaian kinerja tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 182,07%.

Berdasarkan data di bawah bisa dilihat bahwa penanganan tindak kriminal di Kabupaten Magelang selama rentang waktu 2014-2017 masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, dimana hal ini ditunjukkan dengan angka

kriminalitas yang yang fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.22 berikut:

Tabel 3.23
Angka Kriminalitas yang tertangani
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Kejahatan			Angka Kriminalitas
			Lapor	Selesai	Rasio (%)	
1	2014	1.233.695	252	181	71,81	0,20
2	2015	1.245.482	434	332	76,49	0,35
3	2016	1.245.496	252	186	73,30	0,20
4	2017	1.280.679	339	248	73,16	0,26

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

Evaluasi pencapaian kinerja pada indikator mikro persasaran strategis tahun 2017 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan

Dalam rangka memperbaiki akses, pemerataan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang diukur dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kasus Kematian Ibu Melahirkan *)	Kasus	13	11	8	127.27	11	127.27
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) *)	Kasus	8,17	6,60	6,63	99.55	6,50	98.00
3.	Persentase Balita gizi Buruk *)	Persen	13	0,15	0,02	186.67	0,15	186.67
4.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup *)	Permil	8,17	8,00	7,5	106.25	8,00	106.25
5.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	13	100	100	100	100	100
6.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	8,17	100	100	100	100	100
7.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	13	100	100	100	100	100
8.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	8,17	90	90	100	90,00	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
9.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	13	100	100	100	100	100
10	Cakupan kunjungan bayi	Persen	8,17	95	95,56	100,59	95,00	100,59
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						112.03		111.88

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja strategis meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan pada tahun 2017 adalah 112,03% (sangat tinggi).

Beberapa indikator kinerja berhasil memenuhi target dalam RPJMD tahun 2017, di antaranya: Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Persentase Balita Gizi Buruk, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan serta Cakupan kunjungan bayi. Indikator tersebut juga telah memenuhi target pada akhir periode RPJMD.

Anggaran pada strategis meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan sebesar Rp. 301.697.408.061,00 (tiga ratus satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu enam puluh satu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 206.071.120.569,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh satu juta seratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 68.30%.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian urusan kesehatan antara lain:

- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan.
- Masih kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat dan masih rendahnya peran dan dukungan masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui penggalian potensi penganggaran dari berbagai sumber anggaran, untuk peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan;
- b. Pengembangan kualitas sumber daya kesehatan melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan profesi dan kompetensinya serta peningkatan jumlah sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui perekrutan sebagai pegawai BLUD Puskesmas;
- c. Peningkatan promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi fungsi forum kesehatan desa dalam pengembangan Desa Siaga.

Program-program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis adalah:

- a. Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat
 - c. Pengawasan Obat Dan Makanan
 - d. Promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - e. Perbaikan gizi masyarakat
 - f. Pengembangan Lingkungan Sehat
 - g. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - h. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - i. Pelayanan kesehatan penduduk miskin
 - j. Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
 - k. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Jiwa/ Paru - Paru dan RS Mata
 - l. Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - m. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
 - n. Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - o. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
2. Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol

Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin

terkendalinya penambahan penduduk. Sedangkan Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Dan Terkontrol Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhd target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Rerata	1,27	1.63	1,13	69.33	1,57	71.97
2.	Rasio Akseptor KB	-	79,77	81.40	79,71	97.92	81,50	97.80
3.	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	79,77	80.79	79,71	98.66	80,89	98.54
4.	Keluarga Pra Sejahtera	Persen	23,32	22.38	22,33	99.78	20,18	110.65
5.	Keluarga Sejahtera I	Persen	16,98	15.38	16,39	106.57	14,38	113.98
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						94.452		98.588

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol pada tahun 2017 adalah sebesar 94,45% (sangat baik).

Anggaran sasaran strategis terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.3.128.684.235,00 (tiga milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.850.089.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) atau sebesar 91.10 %.

Hambatan dan kendala dalam menjalankan sasaran strategis terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol antara lain:

- a. Masih tingginya *Unmetneed* (ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi), angka *Drop Out*, angka Komplikasi dan Kegagalan, Pernikahan Usia Dini;
- b. Partisipasi Pria untuk berKB masih rendah;
- c. PUS tua (42 - 49 th), yang termasuk *Unmetneed* tidak ikut KB karena sudah tidak mau ikut KB, dengan alasan sudah tua;
- d. Keterbatasan Tenaga Penyuluh yang tinggal sedikit rata - rata 1 penyuluh menangani 5 - 6 desa bahkan ada kecamatan yang 1 Penyuluh KB membina 10 desa binaan padahal idealnya 1 penyuluh 2 desa;
- e. Khusus untuk medis operasi pria, animo masyarakat tidak merata di Kabupaten Magelang, hanya di daerah - daerah tertentu.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas antara lain:

- a. Peningkatan dan pelembagaan keluarga kecil berkualitas melalui Program KB, serta sosialisasi dan peningkatan cakupan layanan KB melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
- b. Memasyarakatkan program KB melalui pembentukan Kampung KB juga memasyarakatkan program KKBPK
- c. Mengoptimalkan peran institusi masyarakat pedesaan yakni, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKBD, dan PKBRT. Saat ini terdapat 372 PPKBD dan 2.895 Sub PPKBD .
- d. Memperkuat kemitraan dengan stakeholders yang tergabung dalam Koalisi Kependudukan maupun Forum Antar Umat Beraga Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) serta mitra kerja lainnya.
- e. Memperluas kemitraan layanan KB tidak hanya dengan klinik KB Pemerintah tetapi juga dengan swasta.

Program-program yang mendukung pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah:

- a. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- b. Program Keluarga Berencana;
- c. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- d. Program pelayanan Kontrasepsi;

- e. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.
3. Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan

Sasaran Strategis kualitas pembangunan manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan, dan akses terhadap pendidikan dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis terdiri dari 23 (dua puluh tiga) indikator, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Magelang. Secara keseluruhan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkat, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	APK PAUD	Persen	60,27	54,23	62,64	115.51	54,54	54,54
2.	Angka melek huruf	Persen	93,55	93,75	94,63	100.94	93,95	100.72
3.	Angka rata-rata lama sekolah	Persen	7,19	9,00	7,40	82.22	10	95.44
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	89,70	96,09	92,66	96.43	97,09	95.44
5.	APM SMP/MTs/Paket B	Persen	62,78	80,85	67,76	83.81	82,65	81.98
6.	APM SMA/MA/SMK/Paket C	Persen	42,70	51,56	46,88	90.92	66,56	70.43
7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	103,69	101,04	105,77	104.68	101,84	103.86
8.	APK SMP/MTs/Paket B	Persen	82,40	96,56	88,36	91.51	97,56	90.57
9.	APK SMA/MA/SMK/Paket C	Persen	60,48	73,40	64,23	87.51	80	80.29
10.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI *)	Persen	0,19	0,15	0,05	33.33	0,14	164.29
11.	APS SMP/MTs *)	Persen	0,35	0,61	0,24	160.66	0,57	157.89
12.	APS SMA/MA/SMK *)	Persen	0,40	0,82	0,13	184.15	0,81	183.95
13.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	99,91	99,99	99.92	99,98	99.99
14.	AL SMP/MTs	Persen	99,98	99,96	99,77	100.19	99,99	99.78
15.	AL SMA/SMK/MA	Persen	99,95	99,10	99,90	100.81	99,98	99.92
16.	Rerata Nilai UN SD/MI	Persen	7,845	7,70	7,59	98.57	7,75	97.94
17.	Rerata Nilai UN SMP/MTs	Persen	5,813	6,46	5,78	89.47	6,49	89.06
18.	Rerata Nilai	Persen	6,106	7,14	5,77	80.81	7,18	80.36

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UNSMA/MA/SMK							
19.	Guru memenuhi Kualifikasi S1/D.4	Persen	84,16	85,00	87,42	102.85	88	99.34
20.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	Persen	90,57	89,42	91,78	102.64	89,62	102.41
21.	AM SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	Persen	76,33	69,87	79,18	113.32	71,55	110.66
22.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	Persen	75,52	82,61	85,58	103.60	86,74	98.66
23.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTs	Persen	81,80	88,57	90,70	102.40	91,43	99.20
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						101.64		105.82

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja *Urusan Pendidikan* pada tahun 2017 adalah sebesar 101,64% (Sangat Tinggi). Dari indikator - indikator tersebut, tercatat 12 (dua belas) indikator yang capaian kinerja tahunannya telah berhasil melampaui target.

Anggaran pada urusan pendidikan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.232.515.914.612,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus dua belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.218.209.126.412 (dua ratus delapan belas milyar dua ratus Sembilan juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah) atau 93,85 %. Hal ini disebabkan banyaknya anggaran Silpa DAK yang tidak terserap karena masuk anggaran perubahan.



Gambar 3.3.
Anugerah Insan Pendidikan Terpuji

Hambatan dan kendala dalam pencapaian urusan pendidikan antara lain:

- Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan,
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- c. Kurangnya sarana prasarana pendidikan;
- d. Perubahan peraturan dari pusat yang mempengaruhi teknis pelaksanaan pada tingkat SKPD.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal;
- d. Penyesuaian dan keselarasan dengan peraturan dari pusat.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan Pendidikan untuk mencapai target-target indikator kinerja di atas adalah:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - c. Program Pendidikan Menengah;
 - d. Program Pendidikan Non Formal;
 - e. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
4. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga

Sasaran Strategis terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta berkesempatan berolahraga memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 5 (lima) indikator kinerja dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.27
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	25	26	26	100.00	27	96.30
2.	Jumlah organisasi olah raga	Organisasi	28	33	29	87.88	36	80.56
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	9	18	17	94.44	19	89.47
4.	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	6	24	24	100.00	24	100.00
5.	Lapangan olah raga	Permil	0,18	1.00	0.02	2.00	2	1.00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						76.86		73.47

Sumber: Dinas Parawisata dan Olah Raga Kabupaten Magelang, 2018

Persentase capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta berkesempatan berolah raga pada tahun 2017 adalah sebesar 76,86 % (Tinggi).

Anggaran pada sasaran strategis terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta berkesempatan berolah raga sebesar Rp.22.780.489.500,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.435.439.292,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 32.64%.

Permasalahan dan kendala dalam pencapaian urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di wilayah kecamatan.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga diwilayah kecamatan.

Peningkatan kinerja pada sasaran strategis dilaksanakan melalui Program-program pendukung sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;

- b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
 - c. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
 - d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
5. Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan perpustakaan diharapkan akan semakin meningkat. Ke depan, perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan koleksi buku dan majalah, namun perpustakaan lebih sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital, dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer. Sasaran strategis Meningkatnya penguasaan Iptek, dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca memiliki tolok ukur capaian keberhasilan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah perpustakaan	Unit	791	773	793	102.59	815	97.30
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	55.854	43.576	39.967	91.72	45.335	88.16
3.	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	2,11	2.15	2.16	100.47	2.24	96.43
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						98.26		93.96

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2018

Persentase Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan pada tahun 2017 adalah sebesar 98,26 % (sangat tinggi).

Anggaran untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya penguasaan iptek, dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca pada tahun 2017 sebesar Rp.7.834.612.650,00 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu

enam ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.321.696.399,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 16,87%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mendukung capaian sasaran strategis meningkatnya penguasaan iptek, dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca adalah:

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
- b. Keterbatasan sarana prasarana perpustakaan daerah, khususnya gedung perpustakaan dan unit armada perpusing;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal;
- d. Keterbatasan tenaga *supporting staff*.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

- a. Peningkatan minat baca masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan perpustakaan sebagai wahana fungsi penelitian, informasi, pelestarian dan rekreasi;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah, khususnya gedung perpustakaan yang lebih representatif;
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan;
- d. Penambahan tenaga *supporting staf* di perpustakaan.

Program yang mendukung untuk pencapaian sasaran strategis adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dimana terdapat 9 (sembilan) kegiatan pada tahun 2017.

6. Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan memiliki tolok ukur capaian keberhasilan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.29.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan
dan Peran Perempuan dalam Pembangunan
Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhd target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	1,94	2.52	1,88	74.60	2,56	73.44
2.	Rasio KDRT	-	0,009	0.026	0.017	65.38	0,024	70.83
3.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Persen	100,00	100	75	75.00	100,00	75.00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						71.66		73.09

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Capaian sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan pada tahun 2017 adalah 71,66 % (Sedang).

Anggaran sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.930.251.000,00 (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.840.123.667,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atau 95.33%.

Prestasi dalam perlindungan perempuan dan anak diperoleh Kabupaten Magelang dalam bentuk Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Gambar 3.4
Penyerahan
Penghargaan
Manggala Karya
Kencana Kepada
Bupati Magelang

Gambar 3.5.
Penyerahan
Penghargaan
Manggala Karya
Kencana Kepada
ketua Tim Penggerak
PKK



Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan selama ini adalah:

- a. Belum optimalnya Pokja Pengarusutamaan Gender dan Anak khususnya dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- b. Belum optimalnya peran perempuan di lembaga pemerintahan dan legislatif
- c. Belum diterapkannya Anggaran Responsif Anak (ARA)
- d. Belum lengkapnya fasilitas sesuai standar pelayanan minimal penanganan kekerasan berbasis gender dan anak seperti rumah perlindungan sosial untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas adalah:

- a. Optimalisasi Pokja Pengarusutamaan Gender dan Anak khususnya dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender melalui penerbitan Surat Edaran Bupati Magelang mengenai penyusunan PPRG di masing - masing SKPD minimal satu kegiatan serta optimalisasi peran Kaukus Perempuan Politik

Indonesia dalam menumbuhkan kader - kader partai perempuan agar mampu bersaing di kancah politik Kabupaten Magelang

- b. Penerapan Anggaran Responsif Anak pada beberapa SKPD yang diharapkan berkontribusi bagi pemenuhan hak - hak anak dan mengupayakan untuk membangun rumah perlindungan sosial yang layak dengan fasilitas sesuai standar pelayanan.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan sasaran strategis adalah :

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - d. Program Peningkatan Peran Serta dan Ksetaraan Gender dalam Pembangunan.
7. Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Urusan sosial dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Berkurangnya kualitas dan kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.30
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas
 dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan
 Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang
 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Buah	39	34	39	114.71	39	100.00
2.	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	Persen	30,49	17.40	28,95	166.38	100	28.95
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						140.54		64.48

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja berkurangnya kualitas dan kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berkurangnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 adalah sebesar 140,54 % (sangat tinggi).

Anggaran persentase capaian kinerja berkurangnya kualitas dan kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berkurangnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.8.929.060.500,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh Sembilan juta enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.022.989.969,00 (delapan milyar dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 89,85%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan sasaran strategis antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran sehingga masih banyak PMKS yang belum tertangani;
- b. Masih terbatasnya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan untuk PMKS;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk fasilitasi pengiriman PMKS ke panti rehabilitasi;

Alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan di atas adalah:

- a. Penambahan anggaran untuk penanganan PMKS;

- b. Pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial;
- c. Penambahan sarana dan prasarana untuk fasilitasi pengiriman PMKS ke panti rehabilitasi;

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada sasaran strategis adalah:

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
 - d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Program Peningkatan Kehidupan Sosial/ Keagamaan.
8. Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya, beragama serta bermoral berdasarkan nilai - nilai Pancasila. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.31

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	81	38	38	100.00	38	100.00
2.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	25	18	27	150.00	18	150.00
3.	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	66,75	66,85	66,85	100.00	70,00	95.50
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						116.67		115.17

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila pada tahun 2017 adalah sebesar 116,67% (sangat tinggi).

Anggaran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila tahun 2017 sebesar Rp.3.867.838.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.704.103.175,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta seratus tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau 95,77%.

Permasalahan dan kendala dalam melaksanakan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila adalah Kesadaran masyarakat di dalam ikut memelihara dan mempertahankan benda, situs, dan kawasan cagar budaya masih rendah.

Alternatif solusinya adalah pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan mempertahankan benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

Program-program yang mendukung pelaksanaan urusan Kebudayaan adalah:

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
9. Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan

Sasaran strategis terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan berperan serta dalam pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberi peluang kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan secara partisipatif dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya peningkatan kemampuan untuk membangun diri dan lingkungannya, serta meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan, agar kondisi kehidupannya mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

Tabel 3.32.
Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang
Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan
Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisa si	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rata-rata Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Rerata	22,47	17,00	20	117,65	19,00	105,26
2.	Rata-rata Kelompok Binaan PKK	Rerata	81,99	28,23	28,24	100,04	39,52	71,46
3.	Jumlah LSM (yang bekerjasama dengan Bapermaspuan dan KB IRE, Water.org, Gerbang Mas, Lembaga Advokasi Bumi, Sahabat Perempuan)	LSM	5	4	4	100,00	6	66,67
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						105,89		81,13

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 sebesar 105,89 % (sangat Tinggi).

Anggaran untuk mendukung sasaran strategis terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan berperan serta dalam pembangunan pada tahun 2017 mencapai Rp. 9.331.684.300,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.8.636.069.775,00 (delapan milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 92,55%.

Permasalahan dan kendala pencapaian sasaran strategis terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan berperan serta dalam pembangunan antara lain:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait dengan pengentasan kemiskinan;

- c. Belum optimalnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan;
- d. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Alternatif solusi terhadap permasalahan - permasalahan di atas antara lain:

- a. Peningkatan peran masyarakat dan pemberdayaan dalam pembangunan;
- b. Peningkatan lembaga perekonomian masyarakat desa melalui pembentukan BUMDesa, mengadvokasi seluruh Kepala desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. Advokasi kepada seluruh kepala desa dan lembaga desa untuk meningkatkan kreativitas dan memunculkan inovasi yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat desa;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang bersifat kemitraan, swadaya, dan gotong - royong.

Program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
 - b. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 - d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
10. Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja

Sasaran strategis meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.33.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya
Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	75,14	75.47	75.46	99.99	76.65	98.46
2.	Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun	Persen	0,53	1.28	1.34	104.69	1.28	100.00
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	19,94	38.42	43.31	112.73	54.27	70.79
4.	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3,84	3.16	3.21	101.58	3.02	104.64
5.	Keselamatan dan perlindungan	Persen	80,32	75	75	100.00	79	94.94
6.	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	100.00	100	100	100.00	100	100.00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						103.16		94.80

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Sasaran strategis meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja pada tahun 2017 adalah sebesar 103,16 % (sangat tinggi).

Anggaran Sasaran strategis meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.6.713.656.000,00 (enam milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.6.222.008.931,00 (enam milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ribu Sembilan raus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 92,68%.

Hambatan dan kendala pada urusan ketenagakerjaan antara lain :

- a. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Keterbatasan anggaran untuk pelatihan kerja calon tenaga kerja;
- c. Belum optimalnya usaha kerja sama penempatan dan kesempatan kerja.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

- a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
- c. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Program-program pembangunan pada Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapatkan Kegiatan Pendampingan Implementasi ISO 9001 : 2015. Hal ini berdasarkan Keputusan Dirjen Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor : 3017 / PPTKPKK / II / 2017 tanggal 2 Februari 2017 tentang Penunjukan lokasi implementasi ISO 9001 : 2015. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2015 untuk pelayanan AK I, AK II, AK III dan CTKI.



Gambar 3.6.
Sertifikat ISO 9001 : 2015
untuk pelayanan AK I, AK
II, AK III dan CTKI

11. Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Sedangkan Usaha Kecil Menengah adalah istilah yang mengacu pada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perludilindungi untuk

mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.33.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Eknomi Lokal Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase koperasi aktif	Persen	80,41	77.76	82,76	141.99	78,18	105.86
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	UKM non BPR/LKM UKM	106.200	106.391	106.200	99.82	106.384	99.83
3.	Jumlah BPR/LKM	BPR/LKM	372	375	297	79.20	382	77.75
4.	Usaha Mikro dan Kecil	Persen	1,57	0.36	1.017	282.50	0,38	267.63
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						141.99		137.77

Sumber: Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan persentase capaian kinerja strategis membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal pada tahun 2017 adalah sebesar 141,99% (sangat tinggi).



Gambar 3.7.

Bupati Magelang Menerima Piala TOP BUMD Award



Gambar 3.8.

Penganugrahan BPR Award Tahun 2017 pada Katagori The Best BPR Of The Year 2017 dan The Best Ceo BPR of The Year 2017

Anggaran kinerja strategis membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 6.136.090.400,00 (enam milyar seratus tiga puluh enam juta Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.5.290.311.344,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) atau 86,22 %.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Masih rendahnya pengelolaan manajemen koperasi;
- b. Kurangnya akses permodalan;
- c. Terbatasnya akses dan informasi pasar;
- d. Belum adanya pusat perdagangan bersama/ UMKM Center.

Alternatif solusi dari permasalahan - permasalahan di atas, antara lain:

- a. Pemberian pelatihan administrasi dan manajemen koperasi;
- b. Kemudahan akses ke perbankan;
- c. Bantuan pemerintah untuk mendapatkan akses dan informasi pasar secara lebih luas;
- d. Dibangunnya pusat perdagangan bersama/ UMKM Center.

Program-program yang dilaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
 - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
 - c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
12. Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah

Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.35.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhd target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	518	1.005	730	55,94	1,164	44,50
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	490.940	605.681	1.030.689	89,88	724,647	67,75
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	14,64	25,19	11,37	65,98	31,19	46,94
4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	Milyar rupiah	14,71	254	539.750	12,68	359	4,10
Persentase Capaian Sasaran Strategis :						56,12		40,82

Sumber: BPMPTSP Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi pada tahun 2017 adalah sebesar 56,12% (cukup). Capaian dari semua indikator belum sesuai dengan target tahunan.

Anggaran sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi pada tahun 2017 adalah sebesar

Rp.1.977.564.800,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.719.342.787,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 86.94%.

Permasalahan dan kendala pada pelaksanaan sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi antara lain:

- a. Belum optimalnya kewenangan pelayanan perijinan penanaman modal;
- b. Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/ PMDN;
- c. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Alternatif solusi terhadap permasalahan - permasalahan di atas antara lain:

- a. Penyusunan regulasi di bidang pelayanan perijinan penanaman modal yang ramah investor;
- b. Peningkatan iklim investasi di daerah;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi investasi.

Program-program pembangunan pada sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah.

13. Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat

Sasaran strategis Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.35.
Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ketersediaan pangan utama beras	Persen	287,25	188.04	287.172	152.72	188.1	152.66
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	-	87,2	91.5	87,10	95.19	93,1	102,95
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						123,95		127,81

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja sasaran strategis makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada Tingkat pada tahun 2017 adalah sebesar 123,95% (sangat baik).

Anggaran untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 3.323.197.500,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.2.830.578.976,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 85,18%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Kesulitan dalam mengubah pola konsumsi masyarakat, dari beras ke non beras;
- b. Belum optimalnya upaya - upaya pengamanan pangan.

Alternatif solusinya adalah:

- a. Kampanye dan sosialisasi tentang diversifikasi pangan secara lebih intensif;
- b. Mengoptimalkan upaya - upaya pengamanan pangan, seperti uji kandungan gizi pangan.

Program yang mendukung ketercapaian urusan Ketahanan Pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

14. Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan budidaya hayati termasuk bercocok tanam dan pembesaran hewan ternak. Kabupaten Magelang ditinjau dari keadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di bidang pertanian. Dengan kondisi topografi dan jenis tanah yang beragam memberikan beragam pula pilihan jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan. Sasaran strategis menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, dengan pengukuran - pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.37
Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian
Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% realisasi terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar								
1.	Produktivitas Padi	Kw/Ha	63,42	60.08	62,90	104.69	60.1	104.66
2.	Produksi Padi	Ton/Th	422.153	355.534	483.331	135.95	355.676	135.89
3.	Produktivitas Jagung	Kw/Ha	59,00	59.25	58,73	99.12	59.3	99.04
4.	Produksi Jagung	Ton/th	71.896	74.277	55.083	74.16	74.337	74.10
5.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	19,90	21.75	22,78	104.74	20.03	113.73
6.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	Persen	33,91	72.61	72,83	100.30	71.84	101.38
7.	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	Persen	6,21	7.46	5,25	70.38	7.73	67.92
8.	Kontribusi Sub Sektor Peternakan	Persen	20,77	12.64	17,65	139.64	13.09	134.84

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% realisasi terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terhadap PDRB							
9.	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	22,06	2.3	2.6	113.04	14.9	17.45
Produksi Hewan ternak								
10.	Sapi potong	Kg	1.767.047	1.789.859	1.791.694	100	1,862,169	96
11.	Kerbau	Kg	561	520	520	100	541	96
12.	Kambing	Kg	749.409	762.462	749.957	98.36	793,265	94.54
13.	Domba	Kg	1.053.382	1.072.305	1.053.911	98.28	1,115,626	94.47
Produksi Hewan Unggas								
14.	Ayam Pedaging	Ton	9.410.958	95,705,000	9,417,335	9.84	9,957,100	94.58
15.	Ayam Ras Petelur	Ton	963.654	980,000	967,668	98.74	1,019,500	94.92
16.	Ayam Buras	Ton	1.164.957	1,191,830	1,170,022	98.17	1,239,980	94.36
17.	Itik	Ton	89.567	90,451	90,445	100	94,106	96.11
18.	Sapi Perah	Liter	715.239	717.184	725.679	101	746,158	97
Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)								
19.	Daging	gr/kap/hr	5,45	5.75	5,87	102.09	6.20	94.68
20.	Telur	gr/kap/hr	3,68	4.10	3,97	96.83	4.65	85.38
21.	Susu	gr/kap/hr	0,023	0.06	0,02	33.33	0.11	18.18
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						94.24		90.75

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja sasaran strategis menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2017 adalah sebesar 94,24% (Sangat tinggi).

Anggaran pada sasaran strategis menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun 2017 adalah sebesar Rp 28.335.264.698,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.699.400.105,00 atau 69.52 %. Sedikitnya penyerapan anggaran karena sebagian besar anggaran berupa kegiatan hibah dimana sesuai dengan peraturan terbaru, kelompok penerima harus berbadan hukum. Hal inilah yang menjadi kendala pencairan anggaran.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada sasaran strategis menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah :

- a. Semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan pangan masyarakat;
- b. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke non pertanian;
- c. Rendahnya daya saing produk - produk pertanian;
- d. Rendahnya akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani;
- e. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;
- f. Belum optimalnya pengembangan potensi peternakan.

Alternatif solusi untuk permasalahan - permasalahan di atas antara lain:

- a. Diversifikasi pangan;
- b. Pengetatan aturan/ kebijakan yang terkait dengan izin pengeringan lahan;
- c. Peningkatan kualitas produk - produk pertanian;
- d. Fasilitasi akses pasar untuk komoditas pertanian bagi petani dan kelompok petani;
- e. Penguatan kelembagaan petani;
- f. Mengoptimalkan pengembangan potensi peternakan.

Program-program yang mendukung pelaksanaan urusan Pertanian adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
- e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan;
- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
- i. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

15. Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan

Sumber daya alam berupa air cukup melimpah di wilayah Kabupaten Magelang sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan darat. Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar sebagai sentra benih ikan. Jumlah rumah pembenihan ada 5 (lima) Balai Benih Ikan (BBI), yang terdiri dari 3 (tiga) BBI Lokal dan 2 (dua) BBI milik Pemerintah Provinsi dengan didukung 2 (dua) Pasar Ikan Pemerintah Kabupaten dan 10 (sepuluh) pasar desa/ kelompok.

Sasaran strategis Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.38.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% cadangan terhdpt target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Produksi Perikanan (Benih)	Juta Ekor	1.419.97	1,500,000	1,717,550	114.50	2,000,000	85.88
2.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	17.483.12	16,000,000	21,058,460	131.62	18,000,000	116.99
3.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	282.98	243.68	275.9	113.22	263.57	104.68
4.	Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	15.5	15	18.61	124.07	15.75	118.16
5.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	Persen	3.16	2.55	2.82	110.59	3.16	89.24
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						118.80		102.99

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja sasaran strategis menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan pada tahun 2017 adalah sebesar 118,80% (sangat tinggi).

Anggaran untuk mendukung sasaran strategis menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.263.193.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.055.684.106,00 atau 90,83%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

- a. Kurang optimalnya usaha pembenihan ikan yang menyediakan benih ikan berkualitas dengan prinsip *Good Breeding Practice*;
- b. Kurangnya akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminan kelangsungan usaha perikanan;
- c. Belum dimanfaatkannya sumber daya perikanan secara optimal;
- d. Kurang berkualitasnya produk hasil perikanan karena lemahnya penerapan *Good Handling Practice* dan *Good Manufacturing Practice*.

Alternatif solusinya adalah :

- a. Penyediaan induk ikan berkualitas;
- b. Meningkatkan akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminan kelangsungan usaha perikanan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya perikanan;
- d. Mengoptimalkan penerapan *Good Handling Practice* dan *Good Manufacturing Practice* untuk meningkatkan kualitas mutu produk hasil perikanan.

Program-program yang mendukung urusan Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- c. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar.

16. Sasaran Strategis Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Sasaran strategis Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan memiliki tolok ukur capaian keberhasilan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.39
Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan
Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,44	10.04	13.41	133.57	9.98	134.37
2.	Ekspor bersih perdagangan	Juta US\$	88.5	88.50	99.89	89.00	99.44	88.50
3.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	Persen	2,056	2.06	114.22	13.55	15.17	2.06
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						115.89		82.99

Sumber: Dinas Pedagan Kabupaten gan Koperasi dan UKM Magelang, 2018

Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan pada tahun 2017 sebesar 115,89 % (sangat tinggi).

Anggaran untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 58.633.717.265,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh lima) dengan realisasi sebesar Rp 53.152.126.895,00 (lima puluh tiga milyar seratus lima puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 90,65 %.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai;
- b. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pameran perdagangan internasional di Jakarta;
- c. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penataan dan pembinaan kepada kelompok pedagang/ usaha informal.

Solusi alternatifnya adalah:

- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kegiatan ekonomi dan pengembangan perdagangan, terutama revitalisasi pasar tradisional, sehingga mendorong pertumbuhan produk unggulan lokal;

- b. Meningkatkan anggaran untuk mengikuti pameran perdagangan internasional di Jakarta sehingga produk - produk unggulan dari Kabupaten Magelang bisa dikenal;
- c. Meningkatkan anggaran untuk melaksanakan penataan dan pembinaan kepada kelompok pedagang/usaha informal sehingga cakupan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal bisa senantiasa meningkat.

Program-program untuk mendukung pencapaian urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan;
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.

17. Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah

Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sektor industri memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Magelang. Sasaran strategis Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber - sumber kekayaan daerah. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.40

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	0,65	2,81	0,72	23,13	2,81	23,13
2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	18,94	18,11	22,66	104,12	17,95	105,51
3.	Pertumbuhan Industri	Persen	3,67	3,76	2,88	97,6	3,76	97,6
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						74,95		73,41

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Persentase capaian kinerja sasaran strategis makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah pada tahun 2017 sebesar 74,95 % (cukup baik).

Anggaran untuk mendukung sasaran strategis makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 4.729.020.000.00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.889.898.191,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) atau 82.26 %.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya kapasitas SDM di level manajerial dan menurunnya kualitas SDM terampil di level proses produksi;
- b. Kurangnya daya saing produk industri kecil;
- c. Kurang adanya keterkaitan antar rantai nilai (bahan baku, proses produksi, dan promosi/ pemasaran).

Alternatif solusi pada permasalahan di atas adalah dengan mengembangkan industri kecil berbasis potensi lokal (SDM, bahan baku, dan budaya) dengan pendekatan kearifan lokal.

Program-program yang mendukung pencapaian urusan Perindustrian antara lain adalah:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
 - b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
 - d. Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial.
18. Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah

Pariwisata menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi di Kabupaten Magelang. Sasaran strategis Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.41
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan
 dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah
 Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kunjungan Wisata Manca Negara	Orang	413.306	607.689	337.515	55,54	860.549	39,21
2.	Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	4.753.255	5.392.611	4.510.363	83,64	6.594.051	68,40
3.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	Persen	4,10	6,36	4,3	67,61	6,89	62,41
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						68,93		56,68

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah pada tahun 2017 adalah sebesar 68,93% (sedang).

Anggaran untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 9.337.302.850,00 (Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi Rp 6.279.800.103,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus ribu seratus tiga rupiah) atau 67.25%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

- a. Fasilitas yang masih terbatas di obyek wisata berupa sarana transportasi umum menuju obyek wisata;
- b. Minimnya atraksi wisata di obyek wisata.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas antara lain:

- a. Penambahan fasilitas di obyek wisata;
- b. Meningkatkan upaya promosi melalui website, media sosial, dan sejenisnya serta meningkatkan jumlah atraksi wisata

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran adalah:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

19. Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru

Sasaran strategis aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan - kawasan pertumbuhan baru memiliki tolok ukur capaian keberhasilan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	66,98	69,25	73,63	106.32	69,73	105.59
2.	Luas jaringan irigasi	Persen	30,57	30,57	41,31	135.13	30,57	135.13
3.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	61,22	62,7	64,55	102.95	67,40	95.77
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						114.80		112.17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja strategis aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan pertumbuhan baru pada tahun 2017 adalah 114,80% (Sangat tinggi).

Anggaran pada strategis aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan - kawasan pertumbuhan baru pada tahun 2017 sebesar Rp286.478.589.813,00 (dua ratus delapan

puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp246.754.977.006,00 (dua ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam rupiah) atau 86,13 %.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan;
- b. Rasio jaringan irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan bangunan irigasi akibat bencana alam;
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.

Alternatif solusi pada urusan Pekerjaan Umum, hendaknya diarahkan pada:

- a. Pembangunan, pemberdayaan, pemerataan, dan aksesibilitas pada infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi;
- b. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam;
- c. Peningkatan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.

Program-program pembangunan dalam urusan Pekerjaan Umum adalah :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
- c. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- g. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- i. Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- j. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
- k. Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi

1. Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air
20. Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat

Penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang didahului proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/498/KEP/25/2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Magelang. Sasaran strategis Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni memiliki tolok ukur capaian kinerja terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.43.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rumah tangga bersanitasi	Persen	80,38	82	81,42	99.29	84,20	96.70
2.	Lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,29	2,55	2,24	87.84	2,45	91.43
3.	Rumah layak huni	Persen	54,23	75	56,7	75.60	85,00	66.71
Persentase Capaian Kinerja Sasaran STRategis :						87.58		84.94

Sumber: Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan perumahan layak dan lingkungan sehat, berkurangnya permukiman kumuh, dan

tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat pada tahun 2017 adalah sebesar 87,58 % (Tinggi).

Anggaran pada sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan perumahan layak dan lingkungan sehat, berkurangnya permukiman kumuh, dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat pada tahun 2017 sebesar Rp.48.021.721.670,00 (empat puluh delapan milyar dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.33.951.225.609,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan rupiah) atau 70,70 %.

Hambatan dan kendala pada urusan perumahan antara lain:

- a. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan;
- b. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- c. Tingginya angka rumah tidak layak huni.

Alternatif solusi kebijakan pada urusan perumahan hendaknya diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman di masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan kebutuhan rumah layak huni.

Program-program pendukung yang dilaksanakan pada pencapaian sasaran strategis meliputi:

- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- d. Program Perencanaan Tata Ruang.

21. Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan

Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral di Kabupaten Magelang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian (bahan galian golongan C). Sasaran strategis Terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya Sumber Daya Alam yang berbasis lingkungan memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.44.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase pertambangan berizin	Persen	16, 22	30	NA	NA	50,00	NA
2.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	Persen	2,90	2,63	4,35	165.40	2.64	164.77
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis:						165.40		164.77

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Persentase capaian kinerja sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya sumber daya alam yang berbasis lingkungan pada tahun 2017 adalah sebesar 165,40% (Sangat tinggi).

Sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya sumber daya alam yang berbasis lingkungan di Kabupaten Magelang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai Oktober 2014 urusan pertambangan ditarik ke Provinsi Jawa Tengah.

22. Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan

Transportasi memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas penduduk maupun barang. Sarana transportasi berupa modal angkutan umum maupun kendaraan pribadi dapat menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten. Sasaran strategis Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perhubungan

memiliki tolok ukur keberhasilan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	3.286.049	3.705.271	2.794.562	75.42	3.705.271	75.42
2.	Jumlah Ijin Trayek	ijin	1.143	1.041	1.089	104.61	1.069	101.87
3.	Rasio Uji Kir Kendaraan	persen	97,32	95.5	98,39	103.03	96,7	101.75
4.	Jumlah Terminal Bis	Terminal	7	7	6	85.71	8	75.00
5.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	menit	32	32	32	100	32	100
6.	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji		Ada	Ada	Ada	100	ada	100
7.	Pemasangat Rambu-Rambu	persen	61,24	75	106,36	141.81	94,00	113.15
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						101.58		95.31

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja sasaran strategis terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perhubungan pada tahun 2017 adalah 101,58% (Sangat tinggi).

Anggaran pada bahwa persentase capaian kinerja sasaran strategis terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perhubungan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.5.704.660.500,00 (lima milyar tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.931.516.432,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau 86.45%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan, yang disebabkan karena keterbatasan anggaran.

- b. Terjadinya fenomena penurunan *loadfactor* penumpang pada penggunaan angkutan umum dan terjadi kecenderungan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, serta banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak masuk terminal.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

- a. Penambahan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan menggali sumber anggaran diluar ABD Kabupaten;
- b. Perbaikan kualitas pelayanan angkutan umum dan Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan perhubungan adalah :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
- f. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

23. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam

Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam memiliki tolok ukur capaian sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja, dengan hasil - hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.46

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capain 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	Persen	>30	>30	31	103.33	>30	103.33
2.	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Persen	0,82	3.70	3,6	97.30	4,00	90.00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capain 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	Persen	0	0	0	0	0	0
4.	Luas Kawasan Lindung (ha)	Ha	25.886	25.886	25.886	100.00	25.886	100.00
5.	Luas Kawasan Budidaya (ha)	Ha	86.405	82.687	82.687	100.00	82.687	100.00
6.	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	IMB	384	613	577	94.13	676	85.36
7.	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	Persen	32	38	35	92.11	38	92.11
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						83.84		81.54

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam pada tahun 2017 adalah sebesar 83,84% (tinggi).

Anggaran urusan Penataan Ruang pada tahun 2017 sebesar Rp.286.478.589.813,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 246.754.977.006,00 (dua ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam rupiah) atau 86,13%. Anggaran tersebut merupakan gabungan dengan DPUPR.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sasaran strategis antara lain:

- a. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kepemilikan IMB;
- b. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian teknis ke non pertanian tidak berizin.

Solusi alternatif untuk permasalahan di atas, adalah:

- a. Pemberian sosialisasi dan informasi yang lebih intensif kepada masyarakat;
- b. Pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan terkait alih fungsi lahan, yang melibatkan lintas SKPD terkait.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan penataan ruang adalah Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

24. Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi semua perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya.

Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan pengukuran sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.47
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase penanganan sampah	Persen	25,62	27	28,14	104.22	31	90.77

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Persen	2,15	1.67	2,85	167.64	2,10	135.71
3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL	Persen	35	25	33,06	132.24	30,00	110.20
4.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	0,98	0,78	0,99	126.92	1,08	91.67
5.	Jumlah daya tampung TPS (m3)	M3	168.376	100.000	186.585	186.59	2.300.000	0.01
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						137.14		85.67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja sasaran strategis terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya pada tahun 2017 adalah sebesar **137,14% (sangat tinggi)**. Semua indikator kinerja capaiannya sesuai/melebihi target.



Gambar 3. 9.
Penghargaan Adipura untuk
Muntilan Katagori Kota Sedang

Anggaran pada sasaran strategis terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya pada tahun 2017 sebesar Rp.37.851.480.188,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh

delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 25.715.003.773,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima belas tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 67.94%.



Gambar 3. 10
Peyerahan dan Penyambutan Penghargaan
Adipura untuk Muntilan Katagori Kota Sedang

Hambatan dan kendala pada urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan persampahan;
- b. Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan sampah;
- c. Rasio TPS yang masih rendah.

Alternatif solusi terhadap permasalahan - permasalahan di atas adalah:

- a. Memperluas cakupan wilayah pelayanan persampahan;
- b. Meningkatkan anggaran untuk mengelola sampah;
- c. Memperbanyak jumlah TPS untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- g. Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- h. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.



Gambar 3.11
Penerimaan Penghargaan Proklamasi
Tingkat Nasional kepada Desa
Karangrejo Kecamatan Borobudur.



Gambar 3.12.
Penerimaan Penghargaan Proklam
Tingkat Nasional kepada Desa
Sambak Kecamatan Kajoran

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara

berkelanjutan. Pelaksanaan Proklam mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim.

25. Sasaran Srategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana

Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak terpisahkan. Sedangkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sasaran srategis terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%), dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.48.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	1.834	2.538	NA	NA	2.822	NA
2.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	Ha	NA	4.75	3,92	NA	4,66	NA
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						NA		NA

Tidak dilakukan analisa terhadap Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana, karena sudah menjadi kewenangan provinsi.

26. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah

Sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah mempunyai tolok ukur capaian kinerja sasaran strategis sebanyak 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.49
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
2.	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhd target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
4.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100,00	100,00	89,19	89,19	100,00	89,19
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						97,3		97,3

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah pada tahun 2017 sebesar 97,3% (sangat tinggi), artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah berhasil menyusun dokumen - dokumen perencanaan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, mengacu pada dokumen - dokumen perencanaan di tingkat atasnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan kerja tahunan. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD tidak mencapai 100% karena adanya program yang telah dialihkan kewenangannya ke pemerintah provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2014 - 2019 telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD tahun 2014 - 2019 merupakan indikator kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada tahun 2017 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 178 program dan seluruhnya sesuai dengan program RPJMD.

Anggaran pada Sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah sebesar Rp.5.498.668.985,00 (lima milyar empat ratus Sembilan

puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp5.172.401.687,00 (lima milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 94.07%.

Kebijakan Sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas kelembagaan perencanaan pada setiap SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.

Program-program pembangunan yang mendukung pelaksanaan sasaran startegis adalah :

- a. Program Pengembangan Data/ informasi;
 - b. Program Kerjasama Pembangunan;
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - f. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
 - h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
27. Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal

sasaran strategis terwujudnya kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah, kualitas pelayanan publik dengan Standar Pelayanan Minimal memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 6 (enam) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.50
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian
 dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta
 Meningkatkan Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik
 dengan Standar Pelayanan Minimal
 Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Capaian 2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		0,41	0.44	0,39	88.64	0.44	88.64
2.	Cakupan petugas Linmas per 10.000 penduduk		90,70	98.41	91,32	92.80	95.54	95.58
3.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	Unit	2	4	2	50.00	4	50.00
4.	Penegakan PERDA	Persen	75,00	75	80,45	107.27	12,02	107.27
5.	Persentase Peningkatan PAD	Persen	8,23	12.02	7,42	61.73	75	9.89
6.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada	ada	Ada	100	Ada	100
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis:						83.40		168.90

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2017 adalah sebesar 83,40% (baik).

Anggaran pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di tahun 2017 adalah sebesar Rp.60.570.989.930,00 (enam puluh milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.50.347.005.236,00 atau sebesar 83.12%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain:

- a. Tingkat eselonisasi yang belum sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga berdampak pada kekurangan jumlah personil;
- b. Kurangnya Diklat SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti keterbatasan mobil patroli yang dimiliki.

Solusi alternatif untuk permasalahan-permasalahan pada sasaran strategis, adalah:

- a. Penyesuaian SOTK Satpol PP;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Diklat SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana, seperti keterbatasan mobil patroli yang dimiliki.

Program-program pembangunan pada sasaran strategis, yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah;
- g. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- j. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- k. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- l. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- m. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- n. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- o. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
- p. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

- q. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
- r. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- s. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- t. Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian;
- u. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber Pendapatan Daerah;
- v. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- w. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan;
- x. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
- y. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.

28. Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih sehingga informasi yang diperoleh bisa dimengerti dan dipahami. Sedangkan informasi adalah segala sesuatu yang mempunyai arti dan nilai bagi penerima informasi. Proses penanganan komunikasi dan penyampaian informasi dilaksanakan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.51
Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah penyiaran Radio/TV lokal	radio lokal / 1 tv lokal	8	6	8/0	120	6	120
2.	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	ada	Ada	100	Ada	100
3.	Jumlah Surat Kabar Lokal/Nasional	Buah	10/3	9/3	9/3	95	9/3	95
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :							105	105

Sumber: Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tahun 2017 adalah sebesar 105% (sangat tinggi).

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2017 Jumlah penyiaran Radio/TV lokal yang sudah berizin berjumlah 9 penyiaran, yang terdiri dari 8 penyiaran radio dan 1 penyiaran TV lokal. Penyiaran radio yang berizin adalah Gemilang, Pop, Best, Merapi Indah, Fastabic, Unima, Walisongo dan Konco Deso. Sedangkan siaran TV lokal adalah Magelang TV. Untuk penyiaran radio/TV lokal yang belum berizin masih banyak yang beroperasi, dalam hal ini diharapkan ke depan semua penyiaran radio/tv lokal tersebut bisa difasilitasi untuk memperoleh izin.

Website milik Pemerintah Daerah telah aktif sampai ke desa - desa melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Program pemberdayaan kontributor website dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan bidang IT setiap tahun secara bertahap. Jumlah Surat Kabar Lokal/ Nasional adalah 9/3, yang terdiri dari Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos, Sindo, Wawasan, Magelang Ekspres, Suara Gemilang, Republika, Merapi, Tribun Yogya / Tempo, Kompas dan Metro.

Anggaran untuk mendukung urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 13.037.399.975,00 (tiga belas milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.11.658.393.126,00 (sebelas milyar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah) atau 89,42%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah terbatasnya akses informasi yang didapat masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informasi.

Alternatif solusinya adalah peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan informasi dan komunikasi, serta penambahan kuantitas jumlah SDM pengelola komunikasi dan informasi.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika adalah:

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
 - b. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - c. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.
29. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil

Sasaran strategis Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan capil memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya dilaksanakan melalui beberapa indikator kinerja dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.52
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	Persen	952.609	91,79	88,66	96,59	91,84	96.54
2.	Bayi Berakte Kelahiran	Persen	13.809	93,37	86,44	92,58	100,00	86.44
3.	Rasio Pasangat Berakte Nikah	Persen	10.600*	1,70	39,37	231,5	1,80	218,7
4.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	sudah	Sudah	100	Sudah	100
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						140,06		133,66

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan catatan sipil pada tahun 2017 adalah sebesar 140,06% (Sangat Tinggi).

Anggaran sasaran strategis meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan catatan sipil pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 8.455.527.400,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.6.850.474.953,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) atau 81.02%.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

- a. Kendala jaringan internet yang tidak lancar di 6 kecamatan sehingga berpengaruh pada jangka waktu pembuatan dokumen kependudukan;
- b. Keterbatasan blanko e-KTP dari pusat, sehingga pencetakan e-KTP tidak sesuai standar waktu;
- c. Kesadaran masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan yang masih rendah, dimana masyarakat biasanya membuat manakala dibutuhkan.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas adalah:

- a. Untuk memperlancar jaringan internet, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang untuk meningkatkan *bandwidth* internet;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana piranti e-KTP pada tahun 2017 agar setiap kecamatan bisa melakukan cetak e-KTP;
- c. Sosialisasi intensif tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Program yang mendukung pelaksanaan sasaran strategis adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
 - b. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
 - c. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
30. Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat

Sasaran strategis Meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, dan Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat memiliki tolok ukur capaian kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.53
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan
 Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan
 Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana
 yang Berdampak pada Masyarakat
 Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	2017			Target akhir RPJMD 2019	% Capaian terhdp target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	9	12	12	100.00	12	100.00
2.	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	6	10	7	70.00	12	58.33
3.	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	Persen	70,00	80	70	87.50	100	70.00
4.	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	Persen	100,00	100	100	100.00	100	100.00
5.	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen	70,00	80	70	87.50	100	70.00
6.	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Persen	100,00	100	100	100.00	100	100.00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						90.83		83.06

Sumber: BPBD dan Kantor Kesbang Pol Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan berkurangnya resiko bencana yang Berdampak pada Masyarakat pada tahun 2017 adalah sebesar 90,83% (Tinggi).

Anggaran pada sasaran strategis meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada Masyarakat pada tahun 2017 sebesar Rp 8.737.261.880.00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh

rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.046.605.315,00 (delapan milyar empat puluh enam juta enam ratus lima ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau 92.10%.

Prestasi BPBD Kabupaten Magelang mendapatkan penghargaan tingkat nasional berupa penganugerahan BPBD Kabupaten/Kota Terbaik II Wilayah Barat yang diserahkan pada saat acara Rapat Kerja Nasional BNPB – BPBD Tahun 2017.



Gemabar 3.13

Penganugerahan BPBD Kabupaten/Kota Terbaik II Wilayah Barat

Permasalahan dan kendala melaksanakan sasaran strategis antara lain:

- a. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam organisasi masyarakat dan politik.
- b. Banyak masyarakat yang belum memanfaatkan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini terbukti baru 79,54 % yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu presiden pada tahun 2014.
- c. Masih terbatasnya SDM yang paham dan mengerti tentang penanganan bencana;
- d. Belum terintegrasinya dan terstandardisasinya mekanisme/ sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang;

- e. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
- f. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Magelang;
- g. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang;
- h. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang;
- i. Belum memadainya kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang;
- j. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Magelang;
- k. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.

Alternatif solusi terhadap permasalahan di atas adalah:

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam organisasi masyarakat dan politik;
- b. Pengembangan wawasan kebangsaan;
- c. Sosialisasi penggunaan hak pilih;
- d. Bimtek tentang penanganan bencana;
- e. Mengintegrasikan dan menstandarisasikan mekanisme/ sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang;
- f. Peningkatan jumlah sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
- g. Menambah ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Magelang;
- h. Menyusun pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang;
- i. Fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Magelang;
- j. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang memadai di Kabupaten Magelang;
- k. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.

Program-program yang mendukung pelaksanaan sasaran strategis adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- b. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- c. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Criminal
- d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- e. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- g. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
- h. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- i. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaranprogram Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumberdaya maka perlu dilakukan analisis efesensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam analisis efesensi dilakukan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan prosentase realisasi anggaran untuk yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut.

Penghitungan analisis efesensi dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja dengan tingkat capaian mencapai 100% atau lebih, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja yang tidak mencapai 100% tidak dilakukan analisis efesensi.

Analisa efesensi dapat dilihat pada tabel 3.35 berikut ini :

Tabel 3.54
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
A. MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama									
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1 Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	127.27	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	3,379,994,000	63,470,500	1.88	0.00	*)
				Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	171,649,335,782	116,443,104,459	67.84	32.16	
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	110,000,000	106,005,660	96.37	3.63	
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan RS mata	44,946,546,900	25,243,896,524	56.16	43.84	*)
				Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	19,000,000	16,599,600	87.37	12.63	
		2 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran *)	99.55	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	3,000,000	2,999,990	99.99	0.01	
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	512,528,000	465,382,230	90.80	9.20	
		3 Persentase Balita Gizi Buruk *)	186.67	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	700,934,000	667,208,229	95.19	4.81	
				Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	21,961,600	21,120,600	96.17	3.83	
		4 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup *)	106.25	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	635,000,000	626,474,040	98.66	1.34	
5 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100.00	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	347,200,000	340,181,780	97.98	2.02			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan	
					Anggaran	Relisasi	%			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
		6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100.00	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7,982,912,400	7,501,539,235	93.97	6.03	
		7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100.00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15,164,288,321	8,852,153,580	58.38	41.62	
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	100.00	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,728,244,000	1,472,861,889	85.22	14.78	
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	97.50	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	29,735,606,632	24,059,095,033	80.91	19.09	
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	100.59	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan praspuskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	19,375,345,463	15,367,221,606	79.31	20.69	
		Capaian Kinerja Sasaran Strategis :		112.03		296,311,897,098	201,249,314,955	67.92	32.08	
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	69.33	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	255,433,000	255,363,000	99.97	0.00	
		12	Rasio Akseptor KB	97.92	Program Keluarga Berencana	2,285,956,235	2,056,976,475	89.98	0.00	
		13	Cakupan Peserta KB Aktif	98.66	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	74,300,000	74,299,400	100.00	0.00	
		14	Keluarga Pra Sejahtera	99.78	Program pelayanan Kontrasepsi	434,495,000	385,135,600	88.64	0.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan	
					Anggaran	Relisasi	%			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
		15	Keluarga Sejahtera I	106.57	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	48,500,000	48,314,600	99.62	0.38	
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			94.452		3,098,684,235	2,820,089,075	91.01	0.00	**)
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	16	APK PAUD	115.51	Program Pendidikan Anak Usia Dini	728,200,335	685,271,645	94.10	5.90	
		17	Angka melek huruf	100.94	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	22,566,168,380	21,762,268,776	96.44	3.56	
		18	Angka rata-rata lama sekolah	82.22	Program Pendidikan Non Formal	1,970,845,000	1,720,913,190	87.32	0.00	
			Angka Partisipasi Murni :							
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96.43						
		20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	83.81						
		21	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	90.92						
			<i>Angka partisipasi kasar</i>							
		22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	104.68	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	197,466,972,597	185,144,642,551	93.76	6.24	
23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	91.51								
24	Angka Partisipasi Kasar	87.51								

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		SMA/SMK/MA/Paket C							
		Angka Putus Sekolah:							
		25 Angka Putus Sekolah SD/MI	33.33						
		26 Angka Putus Sekolah SMP/MTs	160.66						
		27 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	184.15						
		<i>Angka Kelulusan:</i>							
		28 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.92						
		29 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100.19	Program Pendidikan Menengah	0	0			
		30 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100.81						
		<i>Rerata Nilai UN :</i>							
		31 Rerata Nilai UN SD/MI	98.57						
		32 Rerata Nilai UN SMP/MTs	89.47						
		33 Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	80.81						
		34 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	102.85	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,253,586,700	4,094,341,470	96.26	3.74	
		<i>Angka Melanjutkan :</i>							
		35 Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke	102.64						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		SMP/MTs							
		36 Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	113.32						
		37 Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	103.60						
		38 Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	102.40						
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			101.64		226,985,773,012	213,407,437,632	94.02	5.98	
4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	39 Jumlah Organisasi Pemuda	100.00	Program Pengembangan dan Kereserasian Kebijakan Pemuda	616,000,000	493,308,573	80.08	19.92	
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	368,000,000	287,307,020	78.07	0.00	
		40 Jumlah Organisasi Olah Raga	87.88	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2,454,825,000	2,404,602,800	97.95	0.00	
		41 Jumlah Kegiatan Kepemudaan	94.44	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	310,000,000	303,430,710	97.88	0.00	
		42 Jumlah Kegiatan Olah Raga	100.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	15,702,425,000	1,496,655,949	9.53	0.00	
		43 Lapangan Olah Raga	2.00						
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			76.86		19,451,250,000	4,985,305,052	25.63	0.00	**)
5	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat	44 Jumlah Perpustakaan	102.59	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	993,336,150	754,904,420	76.00	0.00	
		45 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	91.72						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
						Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	Melalui Peningkatan Budaya Baca	46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	100.47						
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			98.26		993,336,150	754,904,420	76.00	0.00	**)
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	74.60	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	206,926,000	200,055,075	96.68	0.00	
		48	Rasio KDRT	65.38	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	401,100,000	354,800,100	88.46	0.00	
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	75.00	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	309,800,000	295,953,664	95.53	0.00	
					Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30,000,000	29,999,925	100.00	0.00	
					Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1,012,425,000	989,314,828	97.72	0.00	
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			71.66		1,960,251,000	1,870,123,592	95.40	0.00	**)
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	114.71	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2,139,176,000	1,990,626,545	93.06	6.94	
					51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	166.38	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	370,300,000	324,115,030
		Program pembinaan anak terlantar	100,000,000	97,259,345				97.26	2.74	
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	253,507,000	247,122,335				97.48	2.52	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan	
					Anggaran	Relisasi	%			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
				Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	20,000,000	15,399,950	77.00	23.00		
				Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	36,890,000	36,504,410	98.95	1.05		
				Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	3,017,553,500	2,907,204,180	96.34	3.66		
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			140.54		5,937,426,500	5,618,231,795	94.62	5.38		
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100.00	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,273,028,000	1,263,429,260	99.25	0.75	
		53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	150.00	Program Pengembangan Nilai Budaya	2,305,927,000	2,171,975,895	94.19	5.81	
		54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100.00	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	288,883,000	268,698,020	93.01	6.99	
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			116.67		3,867,838,000	3,704,103,175	95.77	4.23		
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	117.65	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4,509,092,500	4,201,043,263	93.17	6.83	0
		56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	100.04	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1,495,612,000	1,353,494,615	90.50	9.50	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan	
					Anggaran	Relisasi	%			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
		57	Jumlah LSM	100.00	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,340,739,000	1,262,714,375	94.18	5.82	
					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	996,717,300	963,907,705	96.71	3.29	
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			105.89		8,342,160,800	7,781,159,958	93.28	6.72	
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing									
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	99.99	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,844,858,000	2,641,700,608	92.86	0.00	
		59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	104.69	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1,695,453,000	1,596,865,371	94.19	5.81	
		60	Pencari Kerja yang Ditempatkan	NA	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	288,759,000	281,497,760	97.49	0.00	
		61	Tingkat Pengangguran Terbuka	112.73						
		62	Keselamatan dan Perlindungan	101.58						
		63	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100.00	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	173,632,000	144,398,980	83.16	16.84	
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			103.16		5,002,702,000	4,664,462,719	93.24	6.76	
2	Membbaiknya Struktur	64	Persentase Koperasi Aktif	141.99	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	482,704,500	447,540,787	92.72	7.28	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan	
					Anggaran	Relisasi	%			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
	Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	65	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	99.82	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	403,095,000	391,579,900	97.14	0.00	
		66	Jumlah BPR/LKM	79.20	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	864,929,100	829,691,496	95.93	0.00	
		67	Usaha Mikro dan Kecil	282.50	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	267,676,000	241,636,640	90.27	9.73	
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			141.99		2,018,404,600	1,910,448,823	94.65	5.35		
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	55,94	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	639,607,000	480,405,959	75.11	0.00	
		69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	89,88	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	298,516,300	295,255,425	98.91	0.00	
		70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	65,98	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	545,594,800	514,745,705	94.35	0.00	
		71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	12,68	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	57,003,000	56,270,375	98.71	0.00	
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			56,12		1,540,721,100	1,346,677,464	87.41	0.00	**)	
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang	72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	152.72	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1,179,267,500	1,071,791,160	90.89	9.11	
		73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	95.19						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat								
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :		123,95		1,179,267,500	1,071,791,160	90.89	9.11	
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.								
		74	Produktivitas Padi	104.69	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	21,046,994,098	12,896,718,140	61.28	38.72
		75	Produksi Padi	135.95	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	932,732,400	794,429,260	85.17	14.83
		76	Produktivitas Jagung	99.12	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	542,299,000	534,099,025	98.49	0.00
		77	Produksi Jagung	74.16	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	1,211,597,000	1,162,104,565	95.92	0.00
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	104.74	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	975,611,200	970,187,405	99.44	0.56
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	100.30					
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap	70.38					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		PDRB/ADHB							
		81 Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	139.64						
		82 Cakupan Bina Kelompok Petani	113.04						
		Produksi Hewan ternak							
		83 Sapi potong	100.00	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	561,998,500	537,238,955	95.59	4.41	
		84 Kerbau	100.00	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2,241,582,500	2,088,029,480	93.15	0.00	
		85 Kambing	98.36						
		86 Domba	98.28						
		Produksi Hewan Unggas							
		87 Ayam Pedaging	9.84	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	762,450,000	658,603,175	86.38	0.00	
		88 Ayam Ras Petelur	98.74	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	60,000,000	57,990,100	96.65	0.00	
		89 Ayam Buras	98.17						
		90 Itik	100.00						
		91 Sapi Perah	101.00						
		Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)							
		92 Daging	102.09						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
						Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		93	Telur	96.83						
		94	Susu	33.33						
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			94.24		28,335,264,698	19,699,400,105	69.52	0.00	**)
6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	95	Produksi Perikanan (Benih)	114.50	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	253,372,500	244,854,140	96.64	3.36	
		96	Produksi Perikanan Budidaya	131.62						
		97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	113.22						
		98	Konsumsi Ikan	124.07						
		99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	110.59						
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			118.8		253,372,500	244,854,140	96.64	3.36	
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	133.57	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	52,779,794,500	48,037,118,757	91.01	8.99	
		101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	89.00	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1,058,397,965	1,025,319,182	96.87	3.13	
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	13.55	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	231,858,500	227,295,600	98.03	0.00	
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan			4,265,150,000	3,567,137,931	83.63	16.37		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			115.89		58,335,200,965	52,856,871,470	90.61	9.39	
8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	23,13	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	22,005,000	22,005,000	100.00	0.00
		104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	104,12					
		105	Pertumbuhan Industri.		Program Penataan Struktur Industri	3,296,122,000	2,784,103,250	84.47	0.00
					Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1,410,893,000	1,083,789,941	76.82	0.00
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			74.95		4,729,020,000	3,889,898,191	82.26	0.00	
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	106	Kunjungan Wisata Manca Negara	55,54	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7,699,158,850	4,677,806,135	60.76	0.00
		107	Kunjungan Wisata Nusantara	83,64	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,268,814,000	1,260,543,283	99.35	0.00
		108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	67,61	Program Pengembangan Kemitraan	369,330,000	341,450,685	92.45	0.00
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			68.93		9,337,302,850	6,279,800,103	67.25	0.00	
C. MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah									
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta	109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	106.32	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	132,586,251,140	109,125,886,268	82.31	17.69
					Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	49,224,847,679	45,517,788,529	92.47	7.53
					Program Tanggap Darurat Jalan	86,798,000	52,907,500	60.95	39.05

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan	
					Anggaran	Relisasi	%			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
	Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru			dan Jembatan						
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1,119,787,550	1,076,628,206	96.15	3.85		
				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	192,100,000	189,108,610	98.44	1.56		
				Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	403,900,000	391,102,400	96.83	3.17		
		110	Rasio Jaringan Irigasi	135.13	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	10,019,921,000	7,676,133,145	76.61	23.39	
		111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	102.95	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	35,024,614,549	28,731,007,483	82.03	17.97	
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	9,014,684,720	8,418,240,488	93.38	6.62	
					Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	929,911,000	805,981,311	86.67	13.33	
					Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	143,375,000	139,839,738	97.53	2.47	
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :				238,746,190,638	202,124,623,678	84.66	15.34		
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya	112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	99.29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37,501,825,000	24,104,704,247	64.28	0.00	
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	87.84	Program Pengembangan Perumahan	1,466,872,975	1,336,595,896	91.12	0.00	
		114	Rumah Layak Huni (%)	75.60	Program Lingkungan Sehat Perumahan	601,040,500	571,501,053	95.09	0.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat								
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :		87.58						
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	115	Persentase Pertambangan Berijin	NA					
		116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	165.40					
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :		165.4		39,569,738,475	26,012,801,196	65.74	0.00	**)
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	75.42	Program peningkatan pelayanan angkutan	913,921,850	826,962,330	90.49	9.51
		118	Jumlah Ijin Trayek	105.12	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	813,301,000	718,408,376	88.33	11.67
		119	Rasio Uji Kir Kendaraan	103.03					
		120	Jumlah Terminal Bis	85.71	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	286,000,000	279,796,505	97.83	2.17
		121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	100.00	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	701,050,000	419,293,785	59.81	40.19
		122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki	100.00	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	203,167,000	199,605,900	98.25	1.75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji							
		123 Pemasangat Rambu-Rambu	141.81	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	356,300,000	301,382,075	84.59	15.41	
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			101.58		3,273,739,850	2,745,448,971	83.86	16.14	
D. MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup									
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	124 Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	103.33	Program Perencanaan Tata Ruang	742,740,000	693,405,737	93.36	6.64	
		125 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	97.30						
		126 Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	100.00	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	433,577,000	372,299,346	85.87	14.13	
		127 Luas Kawasan Lindung (ha)	100.00						
		128 Luas Kawasan Budidaya (ha)	100.00						
		129 Jumlah IMB yang Dikeluarkan	94.13						
		130 Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta	92.11						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		Analog Dan Peta Digital							
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			83.84		1,176,317,000	1,065,705,083	90.60	9.40	
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	131	Persentase Penanganan Sampah	104.22	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	22,182,457,000	10,538,905,945	47.51	52.49
		132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	135.71	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3,508,715,587	3,417,062,687	97.39	2.61
				132.24	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	265,000,000	254,243,866	95.94	4.06
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	126.92	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,803,304,500	2,672,013,500	95.32	4.68
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	186.59	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	6,667,991,000	6,537,373,375	98.04	1.96
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	229,821,101	211,859,500	92.18	7.82
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			359,726,000	356,118,590	99.00	1.00		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
				Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	43,500,000	36,003,300	82.77	17.23	
				Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	110,000,000	81,610,850	74.19	25.81	
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			137.14		36,170,515,188	24,105,191,613	66.64	33.36	
3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	NA					
		137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	NA					
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			NA		0	0	0.00	0.00	
E. MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis									
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	100,00	Program Pengembangan Data /Informasi	826,305,810	759,931,500	91.97	8.03
		139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	100,00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,581,589,425	1,524,368,174	96.38	3.62
		140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD	100,00	Program Kerjasama Pembangunan	175,000,000	163,284,331	93.31	6.69

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		yang telah ditetapkan dengan PERKADA							
		141 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	89,19	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	336,756,000	320,109,373	95.06	4.94	
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	314,448,000	308,569,155	98.13	1.87	
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	968,622,000	859,093,690	88.69	11.31	
				Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	53,758,750	50,319,000	93.60	6.40	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	70,000,000	62,026,798	88.61	11.39	
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :		97,3		4,326,479,985	4,047,702,021	93.56	6.44	
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur	142 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	88.64	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3,190,942,200	2,198,359,000	68.89	31.11	
				Peningkatan Manajemen Kepegawaian	1,335,595,500	1,295,684,932	97.01	2.99	
		143 Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	92.80	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1,425,000	1,415,000	99.30	0.70	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan	
					Anggaran	Relisasi	%			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
	Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	50.00	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2,211,284,000	2,051,732,605	92.78	0.00	
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	22,422,000	14,471,446	64.54	0.00	
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	21,854,971,500	18,351,960,600	83.97	0.00	
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	79,790,000	67,978,759	85.20	0.00	
					Program peningkatan disiplin aparatur	593,814,000	543,842,970	91.58	0.00	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4,001,036,375	3,637,462,394	90.91	0.00	
		145	Penegakan PERDA	107.27	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1,411,445,000	1,375,860,618	97.48	2.52	
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,005,749,380	1,630,453,933	81.29	18.71	
		146	Persentase Peningkatan PAD	61.73	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20,403,253,430	18,428,578,636	90.32	9.68	
					Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	607,966,000	576,786,495	94.87	5.13	
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22,783,267,700	20,642,501,370	90.60	9.40	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136,681,374,893	113,699,596,473	83.19	16.81	
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,360,133,100		0.00	100.00	
		147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100.00	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1,094,323,000	981,285,230	89.67	10.33
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	120,725,151	117,746,098	97.53	2.47
		148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	100.00	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2,585,505,750	2,447,515,152	94.66	5.34
		149	Buku "PDRB Kabupaten"	100.00					
		150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	116.65	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	216,000,000	213,131,400	98.67	1.33
		151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	78.69	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	53,426,000	51,106,050	95.66	0.00
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	231,877,700	223,986,000	96.60	0.00
		Capaian Kinerja Sasaran Strategis :		83.4		222,846,327,679	188,551,455,161	84.61	0.00 **)
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan	152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	120.00	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	3,906,891,500	3,377,740,737	86.46	13.54
		153	Web Site Milik Pemerintah Daerah	100.00	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	657,585,000	620,722,965	94.39	5.61

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan						
					Anggaran	Relisasi	%								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11						
	Berbagai Pihak	154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	95.00	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	2,708,948,775	2,303,048,547	85.02							
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			105		7,273,425,275	6,301,512,249	86.64	13.36							
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	96,59	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6,780,386,380	5,384,596,507	79.41	0.00						
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran												
		157	Rasio Pasangat Berakte Nikah	92,58											
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK												
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	231,5							Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	248,440,000	240,786,990	96.92	3.08
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	100.00							Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30,000,000	25,132,300	83.77	16.23
Capaian Kinerja Sasaran Strategis :			140,06		7,058,826,380	5,650,515,797	80.05	19.95							
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat														
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	100.00	Program pengembangan wawasan kebangsaan	569,266,000	545,266,900	95.78	4.22						
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	70.00	Program pendidikan politik masyarakat	135,000,000	133,745,606	99.07	0.00						
					Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	898,292,000	853,767,337	95.04	0.00						
					Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	276,535,000	248,660,498	89.92	0.00						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan	
					Anggaran	Relisasi	%			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
				Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,343,878,380	1,324,029,950	98.52	0.00		
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	380,134,000	324,594,000	85.39	0.00		
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	37,360,000	37,359,850	100.00	0.00		
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :		90,83		3,071,199,380	2,922,157,241	95.15	0.00	**)	
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	87.50	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	3,552,383,000	3,172,368,936	89.30	10.70	
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100.00	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	7,785,912,920	7,359,719,635	94.53	5.47	
		165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	87.50						
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100.00						
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis :		90.83		11,338,295,920	10,532,088,571	92.89	0.00	**)	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Program	Anggaran 2017			Tingkat Efisiensi	Keterangan
					Anggaran	Relisasi	%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah/Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis:			102,13		1,254,128,725,778	1,011,004,215,485	80.61	19.39	

Catatan :

- *) Tidak ada efisiensi walau capaian kinerja $\geq 100\%$, karena terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan atau kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sangat rendah.
- **) Tidak dilakukan penghitungan efisiensi, karena capaian kinerja sasaran tidak mencapai $\geq 100\%$.

Berdasarkan tabel efisiensi diatas rata-rata efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 19,39%, tetapi tingkat efisiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

C. Prestasi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang membuahkan hasil berupa prestasi pada beberapa bidang pembangunan, beberapa prestasi dan penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Magelang selama tahun 2017 antara lain:

1. Piala Adipura untuk pertama kalinya bagi Kabupaten Magelang;
2. Anugerah Insan Pendidikan Terpuji;
3. Penghargaan Manggala Karya Kencana Bupati Magelang dari BKKBN
4. Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”
5. Juara Kampung Iklim (Proklam) tingkat Nasional yang diraih oleh Desa Sambak Kecamatan Kajoran dan Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur.
6. Penghargaan Laboratory of Excellence Laboratorium Lingkungan DLH
7. Penganugerahan BPBD Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten/ Kota Terbaik II Wilayah Barat
8. Anugrah Penghargaan Kabupaten Magelang menjadi Kabupaten yang Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM
9. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Sertifikat ISO 9001 : 2015 untuk pelayanan AK I, AK II, AK III dan CTKI diterima oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang
11. TOP Pembina BUMD 2017 pada PD Bank Bapas 69
12. Anugerah BPR Award Tahun 2017 dengan 2 kategori sebagai The Best BPR Of The Year 2017 dan The Best Ceo BPR of The Year 2017
13. PDAM Tirta Gemilang mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan Terbaik Dalam Kinerja dan Pelayanan Memuaskan Tahun 2017
14. Predikat “Pasar Tertib Ukur” dari Kementrian Perdagangan untuk Pasar Salaman
15. Juara I Lomba Defile Pleton Satlinmas dalam rangka HUT ke-67 Satpol PP dan HUT ke-55 Satlinmas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
16. Juara harapan II Lomba Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah
17. Juara Harapan I Lomba Kawasan Tertib dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam rangka HUT

ke-67 Satpol PP dan HUT ke-55 Satlinmas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

18. Sepuluh besar Pangripta Abhipraya tingkat Jawa Tengah, serta penghargaan – penghargaan lainnya sebagaimana terdapat pada buku III LKPJ.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnya dalam pemanfaatan anggaran

P
e
n
u
t
u
p

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Magelang dan dukungan serta partisipasi masyarakat serta dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikannya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Magelang tahun 2017 pada indikator makro telah tercapai 110,86% (sangat tinggi), jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh yaitu sebesar 106,63% (sangat tinggi), hal ini menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator makro sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui, baik pada target tahun 2017 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2019.

Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 pada indikator mikro telah tercapai 102,13% (sangat tinggi), jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh dimana yaitu sebesar 96,11% (sangat tinggi), hal ini menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator mikro sasaran startegis telah tercapai bahkan terlampaui pada target tahun 2017 dan target akhir periode RPJMD pada tahun 2019 hampir tercapai.

Dalam penyusunan dokumen dijumpai permasalahan atau kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis diantaranya :

1. Terlalu banyaknya sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019, sehingga menyulitkan dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data.
2. Masih banyaknya indikator kinerja sasaran strategis yang bersifat *output* dan berubah rumus pengukurannya.
3. Kesulitan di dalam mengumpulkan data kinerja dari SKPD, terutama capaian kinerja yang bersifat makro, dan diperlukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Badan Pusat Statistik.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas antara lain :

1. Menyederhanakan jumlah sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pada RPJMD dan Renstra SKPD periode RPJMD berikutnya.
2. Menyusun indikator kinerja tingkat kabupaten minimal bersifat *outcome* serta memastikan rumus penghitungan indikator tidak berubah-ubah.
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam perolehan dan pengolahan indikator makro.

Harapan kami untuk tahun-tahun mendatang LKjIP Kabupaten Magelang selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan misi dan sasaran strategis organisasi, juga dapat digunakan sebagai upaya memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah.

Demikian LKjIP Kabupaten Magelang yang menggambarkan capaian kinerja sasaran srategis dan indikator kinerja utama dan pada tahun 2017 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2018



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

Jabatan : BUPATI MAGELANG

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kota Mungkid, November 2017

BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
INDIKATOR KINERJA UTAMA					
	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama				
	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat				
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
		1.	Angka Usia Harapan Hidup	70,45	tahun
		2.	Indeks Gini	0,305	indeks
		3.	IndeksWilliamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4066	indeks
		4.	Persentase penduduk miskin	9,99	persen
		5.	IPM	75,14	indeks
	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing				
	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah				
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
		6.	Pertumbuhan PDRB	6,0 – 6,5	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		7.	PDRB per kapita	12,56	Juta Rp
		8.	Laju inflansi	5±1	persen
		9.	Rasio penduduk yang bekerja	97,17	persen
	ASPEK DAYA SAING				
		10.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	32,47	Rp,(juta)
		11.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	36,09	persen
		12.	Nilai tukar petani	106,70	
	MISI III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah				
	ASPEK DAYA SAING				
		13.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,0021	
	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup				
	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan				
	ASPEK DAYA SAING				
		14.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	76,40	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		15.	Luas Wilayah Industri	0,37	persen
	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis				
	Meningkatkan Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis				
	ASPEK DAYA SAING				
		16.	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	hari
		17.	Opini BPK 'WTP'	WTP	
		18.	Nilai AKIP	B	
	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat				
	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum				
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
		19.	Angka kriminalitas	2,13	indek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
ASPEK PELAYANAN UMUM					
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama				
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	Urusan : Kesehatan			
		1.	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	11	kasus
		2.	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1,000 Kelahiran	6,60	kasus
		3.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,15	persen
		4.	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	8,00	Permil
		5.	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	persen
		6.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	persen
		7.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	persen
		8.	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90,00	persen
		9.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	persen
10.	Cakupan Kunjungan Bayi	95,00	persen		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
2,	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	Urusan: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
		11.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,63	persen
		12.	Rasio Akseptor KB	81,40	persen
		13.	Cakupan Peserta KB Aktif	80,79	persen
		14.	Keluarga Pra Sejahtera	22,38	persen
		15.	Keluarga Sejahtera I	15,38	persen
3,	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkatkan, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	Urusan: Pendidikan			
		16.	APK PAUD	54,23	persen
		17.	Angka melek huruf	93,75	persen
		18.	Angka rata-rata lama sekolah	9,00	persen
		Angka Partisipasi Murni :			
		19.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,09	persen
		20.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80,85	persen
		21.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	51,56	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
		Angka partisipasi kasar		
		22. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	101,04	persen
		23. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	95,56	persen
		24. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	73,40	persen
		Angka Putus Sekolah:		
		25. Angka Putus Sekolah SD/MI	0,15	persen
		26. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,61	persen
		27. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,82	persen
		Angka Kelulusan:		
		28. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,91	persen
		29. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,96	persen
		30. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,10	persen
		Rerata Nilai UN :		
		31. Rerata Nilai UN SD/MI	7,70	nilai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	
1	2	3		4	5	
		32.	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6,46	nilai	
		33.	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	7,14	nilai	
		34.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,00	persen	
		Angka Melanjutkan :				
		35.	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,42	persen	
		36.	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	69,87	persen	
		37.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	82,81	persen	
		38.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	88,57	persen	
4,	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	Urusan: Kepemudaan dan Olah Raga				
		39.	Jumlah Organisasi Pemuda	26	organisasi	
		40.	Jumlah Organisasi Olah Raga	33	organisasi	
		41.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	18	kegiatan	
		42.	Jumlah Kegiatan Olah Raga	24	kegiatan	
		43.	Lapangan Olah Raga	1,00	permil	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
5,	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	Urusan : Perpustakaan			
		44.	Jumlah Perpustakaan	773	unit
		45.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	43,576	orang
		46.	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	2,15	persen
6,	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		47.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,52	persen
		48.	Rasio KDRT	0,026	persen
		49.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100	persen
7,	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Urusan : Sosial			
		50.	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	unit
		51.	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	17,40	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
8,	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	Urusan : Kebudayaan			
		52.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	kali
		53.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	18	unit
		54.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	66,85	persen
9,	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
		55.	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	17,00	persen
		56.	Cakupan Kelompok Binaan PKK	28,23	persen
		57.	Jumlah LSM	5	LSM
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing				
1,	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	Urusan: Ketenagakerjaan			
		58.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	75,46	persen
		59.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	persen
		60.	Pencari Kerja yang Ditempatkan	38,42	persen
		61.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,16	persen
		62.	Keselamatan dan Perlindungan	75,00	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		63.	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	persen
2,	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	Urusan : Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
		64.	Persentase Koperasi Aktif	77,76	persen
		65.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.391	UKM non BPR/ LKM UKM
		66.	Jumlah BPR/LKM	375	BPR/LKM
		67.	Usaha Mikro dan Kecil	0,36	persen
3,	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	Urusan: Penanaman Modal			
		68.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.005	investor
		69.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	605.681	Juta rupiah
		70.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	25,19	persen
		71.	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	254	milyar rupiah
4,	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	Urusan: Ketahanan Pangan			
		72.	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188,04	persen
		73.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	91,5	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
5,	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,	Urusan: Pertanian			
		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar			
		74.	Produktivitas Padi	60.08	Kw/ha
		75.	Produksi Padi	335.534	Ton/th
		76.	Produktivitas Jagung	59.25	Kw/ha
		77.	Produksi Jagung	74.277	Ton/th
		78.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	21,75	persen
		79.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	72,61	persen
		80.	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	7,,46	persen
		81.	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	12,64	persen
		82.	Cakupan Bina Kelompok Petani	2,3	persen
		Produksi Hewan ternak			
		83.	Sapi potong	1,789,859	kg
		84.	Kerbau	520	kg

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	
1	2	3		4	5	
		85.	Kambing	762.462	kg	
		86.	Domba	1.072.305	kg	
		Produksi Hewan Unggas				
		87.	Ayam Pedaging	9.570,5	ton	
		88.	Ayam Ras Petelur	980,00	ton	
		89.	Ayam Buras	1.191,83	ton	
		90.	Itik	90.451	ton	
		91.	Sapi Perah	717.184	liter	
		Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)				
		92.	Daging	5,75	gr/kap/hr	
		93.	Telur	4,10	gr/kap/hr	
		94.	Susu	0,06	gr/kap/hr	
		6,	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	Urusan: Kelautan dan Perikanan		
95.	Produksi Perikanan (Benih)			1.500	juta ekor	
96.	Produksi Perikanan Budidaya			16.000	ton	
97.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)			234.68	ton	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		98.	Konsumsi Ikan	15.00	Kg/kap/ tahun
		99.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	2,55	persen
7,	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	Urusan: Perdagangan			
		100.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	10,04	persen
		101.	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	88,6	Juta US\$
		102.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	1,80	persen
8,	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	Urusan: Perindustrian			
		103.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2,81	persen
		104.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	18,11	persen
		105.	Pertumbuhan Industri,	3,76	persen
9,	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	Urusan: Pariwisata			
		106.	Kunjungan Wisata Manca Negara	607.689	orang
		107.	Kunjungan Wisata Nusantara	5.392.611	orang
		108.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6.36	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
C.	MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
1,	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	Urusan: Pekerjaan Umum			
		109.	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,25	persen
		110.	Rasio Jaringan Irigasi	30,57	persen
		111.	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	62,70	persen
2,	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	Urusan: Perumahan			
		112.	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	82,00	persen
		113.	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,55	persen
		114.	Rumah Layak Huni (%)	75,00	persen
3,	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral			
		115.	Persentase Pertambangan Berijin	30	persen
		116.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2,63	persen
4,	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	Urusan: Perhubungan			
		117.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	orang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		118.	Jumlah Ijin Trayek	1.041	ijin
		119.	Rasio Uji Kir Kendaraan	95,9	persen
		120.	Jumlah Terminal Bis	7	terminal
		121.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	menit
		122.	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	Ada	
		123.	Pemasangan Rambu-Rambu	75,00	persen
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup				
1,	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	Urusan: Penataan Ruang			
		124.	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	persen
		125.	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	3,70	persen
		126.	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0	persen
		127.	Luas Kawasan Lindung (ha)	25.886	ha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		128.	Luas Kawasan Budidaya (ha)	8.2687	Ha
		129.	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	613	IMB
		130.	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	38,00	persen
2,	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	Urusan: Lingkungan Hidup			
		131.	Persentase Penanganan Sampah	27,00	persen
		132.	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	1,70	persen
		133.	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	25	persen
		134.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	0,078	persen
		135.	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	100.000	m ³
3,	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	Urusan: Kehutanan			
		136.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2.538	ha
		137.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4,75	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis				
1,	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	Urusan: Perencanaan Pembangunan			
		138.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	
		139.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	
		140.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	
		141.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	persen
2,	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
		142.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10,000 Penduduk	0,44	
		143.	Cakupan PetugasLinmas per Jumlah 10,000 Penduduk	98,41	
		144.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	4	
		145.	Penegakan PERDA	75	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	
1	2	3		4	5	
		146.	Persentase Peningkatan PAD	12,02	persen	
		147.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada		
		Urusan : Statistik				
		148.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada		
		149.	Buku "PDRB Kabupaten"	ada		
		Urusan : Kearsipan				
		150.	Pengelolaan Arsip Secara Baku	72,87	persen	
		151.	Peningkatan SDMPengelola Kearsipan	235	orang	
3,	Meningkatnya Hubungan KerjasamayangSaling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	Urusan : Komunikasi dan Informatika				
		152.	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6	penyiaran	
		153.	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada		
		154.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	9/3		
4,	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Cakil	Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil				
		155.	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,79	persen	
		156.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	93,37	persen	
		157.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1,70	persen	
		158.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
		Urusan : Pertanahan		
		159. Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33,76	persen
		160. Penyelesaian Izin Lokasi	100	persen
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat			
1,	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
		161. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	12	kegiatan
		162. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	10	kegiatan
2,	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
		163. Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	80	persen
		164. Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	persen
		165. Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	80	persen
		166. Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	persen

PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
	URUSAN SEMUA SKPD		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22.783.267.700	- Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak - Pendapatan Asli Daerah - Hibah - SILPA
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136.681.374.893	
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	593.814.000	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.001.036.375	
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.360.133.100	
	URUSAN: KESEHATAN		
6.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.982.912.400	
7.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	15.164.288.321	
8.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	110.000.000	
9.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	635.000.000	
10.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	700.934.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
11.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	347.200.000	
12.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.728.244.000	
13.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	512.528.000	
14.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	29.735.606.632	
15.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras,puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	19.375.345.463	
16.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R,S mata	44.946.546.900	
17.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	19.000.000	
18.	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	21.961.600	
19.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	3.379.994.000	
20.	Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	171.649.335.782	
21.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	3.000.000	
	URUSAN: KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA		
22.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	255.433.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
23.	Program Keluarga Berencana	2.285.956.235	
24.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	74.300.000	
25.	Program pelayanan Kontrasepsi	434.495.000	
26.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	48.500.000	
	URUSAN: PENDIDIKAN		
27.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	728.200.335	
28.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	197.466.972.597	
29.	Program Pendidikan Menengah	0	
30.	Program Pendidikan Non Formal	1.970.845.000	
31.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.253.586.700	
32.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	22.483.168.380	
	URUSAN: PEMUDA DAN OLAH RAGA		
33.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	616.000.000	
34.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	368.000.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
35.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	403.095.000	
36.	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	310.000.000	
37.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2.454.825.000	
38.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	15.702.425.000	
	URUSAN: PERPUSTAKAAN		
39.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	993.336.150	
	URUSAN: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
40.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	206.926.000	
41.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	401.100.000	
42.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	309.800.000	
43.	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pegasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30.000.000	
44.	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1.012.425.000	
	URUSAN: SOSIAL		
45.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	2.177.241.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
46.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	370.300.000	
47.	Program Pembinaan Anak Terlantar	100.000.000	
48.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	253.507.000	
49.	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	20.000.000	
50.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	36.890.000	
51.	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	3.017.553.500	
	URUSAN: KEBUDAYAAN		
52.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.273.028.000	
53.	Program Pengembangan Nilai Budaya	2.305.927.000	
54.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	288.883.000	
	URUSAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
55.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4.509.092.500	
56.	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.495.612.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
57.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.340.739.000	
58.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	996.717.300	
	URUSAN: KETENAGAKERJAAN		
59.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.844.858.000	
60.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.695.453.000	
61.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	288.759.000	
	URUSAN: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
62.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	482.704.500	
63.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	403.095.000	
64.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	864.929.100	
65.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	267.676.000	
	URUSAN: PENANAMAN MODAL		
66.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	639.607.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
67.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	298.516.300	
68.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	545.594.800	
69.	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	57.003.000	
	URUSAN: KETAHANAN PANGAN		
70.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.179.267.500	
	URUSAN: PERTANIAN		
71.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	21.046.994.098	
72.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	932.732.400	
73.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	542.299.000	
74.	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	1.211.597.000	
75.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	561.998.500	
76.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	2.241.582.500	
77.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	762.450.000	
78.	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	60.000.000	
79.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.211.597.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
80.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	975.611.200	
	URUSAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN		
81.	Program pengembangan budidayaperikanan	464.422.000	
82.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	253.372.500	
83.	Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan	0	
	URUSAN: PERDAGANGAN		
84.	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	52.779.794.500	
85.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.058.397.965	
86.	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	231.858.500	
87.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	298.516.300	
88.	Program pembinaan pedagang kakilima/ asongan	4.265.150.000	
	URUSAN: PERINDUSTRIAN		
89.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	0	
90.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	22.005.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
91.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	0	
92.	Program Penataan Struktur Industri	3.296.122.000	
93.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1.410.893.000	
	URUSAN: PARIWISATA		
94.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7,699,158,850	
95.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,268,814,000	
96.	Program Pengembangan Kemitraan	369,330,000	
	URUSAN: PEKERJAAN UMUM		
97.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	132,586,251,140	
98.	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	10,019,921,000	
99.	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	49,224,847,679	
100.	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	86,798,000	
101.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1,119,787,550	
102.	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	35,024,614,549	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
103.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	9.014.684.720	
104.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	192.100.000	
105.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	403.900.000	
106.	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	929.911.000	
107.	Program Pengembangan Data/ Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	143.375.000	
108.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	7.785.912.920	
	URUSAN: PERUMAHAN		
109.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37.501.825.000	
110.	Program Pengembangan Perumahan	1.466.872.975	
111.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	601.040.500	
	URUSAN: ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL		
112.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	0	
113.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan	0	
114.	Program pengembangan Geologi Daerah,	0	
115.	Program Pengembangan Energi Alternatif	0	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
116.	Program Pengembangan ESDM	0	
	URUSAN: PERHUBUNGAN		
117.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	813.301.000	
118.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	356.300.000	
119.	Program peningkatan pelayanan angkutan	913.921.850	
120.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	286.000.000	
121.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	701.050.000	
122.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	203.167.000	
	URUSAN: PENATAAN RUANG		
123.	Program Perencanaan Tata Ruang	0	
124.	Program Pemanfaatan Ruang	0	
125.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	433.577.000	
	URUSAN: LINGKUNGAN HIDUP		
126.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	22.182.457.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
127.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.508.715.587	
128.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	265.000.000	
129.	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan,	6.667.991.000	
130.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.803.304.500	
131.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	229.821.101	
132.	Program Pegelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	359.726.000	
133.	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	43.500.000	
134.	Program Pengembangan Kapasitas dan Kemampuan Laboratorium Lingkungan	110.000.000	
	URUSAN: KEHUTANAN		
135.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	0	
136.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0	
137.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	0	
	URUSAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
138.	Program Pengembangan Data /Informasi	826.305.810	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
139.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.581.589.425	
140.	Program Kerjasama Pembangunan	175.000.000	
141.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	336.756.000	
142.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	314.448.000	
143.	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	968.622.000	
144.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	53.758.750	
145.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	70.000.000	
	URUSAN: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN		
146.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	20.403.253.430	
147.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.190.942.200	
148.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.211.284.000	
149.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	4.001.036.375	
150.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.411.445.000	
151.	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	607.966.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
152.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1.094.323.000	
153.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.585.505.750	
154.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	79.790.000	
155.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.005.749.380	
156.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	22.422.000	
157.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	21.854.971.500	
158.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	120.725.151	
159.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	84.425.000	
160.	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	1.335.595.500	
	URUSAN: STATISTIK		
161.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	160.400.000	
	URUSAN: KEARSIPAN		
162.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	216.000.000	
163.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	53.426.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
164.	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	0	
165.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	231.877.700	
	URUSAN: KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
166.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	3.906.891.500	
167.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	657.585.000	
168.	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	2.708.948.775	
	URUSAN: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
169.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.780.386.380	
	URUSAN: PERTANAHAN		
170.	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	248.440.000	
171.	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30.000.000	
	URUSAN: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		
172.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	569.266.000	
173.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	3.552.383.000	
174.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	898.292.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
175.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	569.266.000	
176.	Program pendidikan politik masyarakat	135.000.000	
177.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.343.878.380	
178.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	380.134.000	
179.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keteriban Dan Keamanan	37.360.000	
	URUSAN: TRANSMIGRASI		
180.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	173.632.000	
	JUMLAH	1,254,128,725,778	

Kota Mungkid, November 2017



BUPATI MAGELANG
MAGEL
ZAENAL ARIFIN, S.I.P.